



Rencana Strategis

BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

Tahun 2020-2024

PERUBAHAN KETIGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmatNya sehingga Rencana Strategis Perubahan Pertama Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang 2020 - 2024 hasil Reviu Tanggal 22 Juni dapat tersusun.

Rencana Strategis Perubahan Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang 2020 - 2024 BBPI-Tahun Anggaran 2019, disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Program Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020 - 2024. Laporan ini mencakup isu – isu strategis, visi – misi, faktor – faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Balai Bsar Penangkapan Ikan Semarang Tahun 2020 – 2024.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi membantu dan memberikan masukan serta saran sehingga penyusunan Laporan Rencana Strategis Perubahan ini dapat diselesaikan.

Laporan ini masih jauh dari sempurna sumbang saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun kami harapkan untuk perbaikan laporan di kemudian hari.

Semarang, September 2022

Ketua Balai Besar Penangkapan Ikan



Barus Oktori Sutrisno

661027 199101 1 001



Bab 1

Pendahuluan

Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	3
Landasan Hukum	4
Hubungan Renstra BBPI dengan RPJM Nasional.....	4
Sistematika Pembahasan.....	5

1.1 Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sangat penting bagi Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari posisi dan potensi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas perairan yang mencapai $\frac{3}{4}$ dari total wilayah dengan kekayaan sumberdaya yang luar biasa yang terkandung di dalamnya.

Potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun, atau setara dengan 10 kali total APBN. Namun demikian, potensi yang telah dikelola dan dimanfaatkan diperkirakan masih kurang dari 10 persen. Melihat kondisi ini, masih banyak peluang untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prospektifnya peran sektor kelautan dan perikanan antara lain diungkapkan konsultan internasional ternama yakni McKinsey Global Institute. Menurut proyeksi McKinsey, ekonomi Indonesia akan menjadi negara terbesar ke-7 dunia pada tahun 2030. Ekonomi Indonesia tersebut akan ditopang oleh 4 (empat) sektor utama, yakni (1) sumber daya alam (diantaranya minyak dan gas), (2) hasil pertanian, (3) Perikanan, dan (5) Jasa. Dalam hal ini terdapat peluang ekonomi dan bisnis senilai lebih dari 1,8 triliun dollar AS dari beberapa sektor yang diperkirakan tumbuh pesat dari jasa konsumen, pertanian dan perikanan, serta sumber daya alam.

Salah satu sub bidang yang mempunyai peran cukup strategis dan masa depan yang cerah dalam menyokong pembangunan kelautan dan perikanan adalah sub bidang perikanan tangkap, baik perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum daratan. Sub bidang perikanan tangkap tidak hanya berperan penting dalam sektornya sendiri tetapi juga memiliki multiplier effect yang sangat besar kepada sektor terkait lainnya, bahkan menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan dan integritas nasional.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sektor kelautan dan perikanan, peran sub bidang perikanan tangkap masih strategis, yakni sebagai: (i) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (ii) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (iii) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (iv) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (v) pengokoh identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Dengan peran strategis yang dimiliki, sub bidang perikanan tangkap masih dapat menjadi andalan di masa depan, khususnya dalam menopang kemajuan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Kesuksesan pelaksanaan pembangunan tentu saja membutuhkan dukungan semua pihak untuk bahu membahu memajukan sub sektor perikanan tangkap. Langkah awal yang sangat penting adalah menyusun perencanaan pembangunan yang baik, andal, akurat, aspiratif, dan komprehensif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2)

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Sejalan dengan *Grand Design* Kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu; upaya untuk memanfaatkan sumberdaya hayati perairan secara optimal dan lestari dan mewujudkan SDM perikanan tangkap (petugas, nelayan, *stake holder*) yang profesional, berkarakter, berkinerja tinggi, dan berjiwa wirausaha, Balai Besar Penangkapan Ikan memiliki peran strategis dalam pengembangan kajian produktivitas dan teknologi inovatif penangkapan ikan. Peran tersebut dijabarkan ke dalam serangkaian kegiatan ujicoba kerekayasaan dan diseminasi informasi perikanan tangkap, meliputi kegiatan-kegiatan pengembangan teknik penangkapan ikan, uji coba, pengujian, penerapan standar kapal perikanan dan alat penangkap ikan serta sertifikasi sarana penangkapan ikan, identifikasi daerah penangkapan ikan, musim ikan, cara penangkapan, rehabilitasi lingkungan perairan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional di BBPI, sebagaimana diatur dalam undang-undang. BBPI sebagai UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal perikanan Tangkap, terkait dengan peran strategis tersebut, berusaha menjabarkannya dalam RENSTRA perubahan periode tahun 2020-2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Balai Besar Penangkapan Ikan Tahun 2020-2024 ini dimaksudkan untuk menjawab adanya kebijakan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang sangat dinamis. Selain itu untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aktifitas di BBPI, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok fungsi dan sasaran pembangunan kelautan perikanan yang berpedoman kepada RPJMN 2020-2024.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis BBPI adalah memberikan arah dan pedoman yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, bagi seluruh jajaran BBPI dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mendasarkan RPJMN 2020-2024.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
7. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penangkapan Ikan

1.4 Hubungan Renstra BBPI dengan RPJM Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita di atas dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yakni melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi

industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi, Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat serta mengembangkan infrastruktur kluster kelautan-perikanan.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diserasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Visi, Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra sebelumnya, BBPI sebagai instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan upaya pengejawantahan ke dalam visinya yaitu "Terwujudnya Penangkapan Ikan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan".

Terkait dengan hal tersebut maka BBPI dituntut dalam pelaksanaan tugas pokoknya untuk melaksanakan pengembangan penangkapan ikan dan pelestarian sumberdaya ikan, khususnya yang mengacu pada Kebijakan Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan di masa mendatang (kurun waktu tahun 2020-2024).

1.5 Sistematika Pembahasan

Dokumen Renstra Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renstra yang diawali dengan uraian singkat tentang latar belakang kondisi sektor Kelautan dan Perikanan secara Nasional, termasuk permasalahan dan strategi umum pengelolaannya. Selain itu, dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan Renstra, keterkaitan dengan RPJMN 2020-2024, serta uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra ini.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN (BBPI)

Bab ini memuat rumusan Tugas Pokok dan Fungsi, termasuk Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Tugas dan Fungsi serta hal-hal lain yang dianggap penting bagi setiap personil dalam Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) dalam melaksanakan tugas pengabdianya.

BAB III GAMBARAN PELAYANAN BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN (BBPI)

Bab ini memuat kondisi Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) saat ini, termasuk di dalamnya kesesuaian tugas dan fungsi berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja. Hal lain yang dibahas pada bab ini adalah gambaran kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan, berupa Standar Pelayanan Minimum dan Hasil Kerja yang ingin dicapai.

BAB IV ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini memuat isu-isu strategis berupa kendala, peluang dan program-program prioritas dalam penanganan kendala dan pemanfaatan peluang yang ada dalam optimalisasi tugas pokok dan fungsi Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI).

BAB V VISI DAN MISI BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN (BBPI)

Bab ini memuat Visi (rumusan tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode), Misi (rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi) yang dianut dan digunakan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pencapaian visi dan misi Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN,

Bab ini memuat analisa Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dan Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE), Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE), penetapan asumsi strategis KAFI dan KAFE melalui Analisis SWOT, penetapan proritas asumsi strategis berdasarkan tingkat keterkaitan dengan visidan misi dan penetapan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK) sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian program melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun ke depan .

BAB VII TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan (penjabaran dari visi yang lebih spesifik dan terukur), sasaran agregat bidang yang mendukung sasaran, strategi mewujudkan tujuan secara konseptual, analitis, realistis dan komprehensif dan diwujudkan oleh kebijakan sebagai penentu konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, berdasarkan dari faktor-faktor kunci keberhasilan.

BAB VIII PENTAHAPAN PENCAPAIAN PROGRAM (KEGIATAN)

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, penjelasan prioritas-prioritas program, kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya yang sah dalam periode 5 (lima) tahun dan tahunan serta indikator kinerja Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPI) berupa refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan serta terukur. Indikator-indikator kinerja tersebut berupa angka, prosentase dan penjelasan naratif.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat penegasan fungsi renstra perubahan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI), yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, implementasi penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan, serta memuat pula catatan dan harapan.

LAMPIRAN



Tugas Pokok dan Fungsi BBPI

Sejarah Berdirinya BBPI.....	8
Organisasi dan Ketatalaksanaan.....	9
Tata Kerja	19

2.1 Sejarah Berdirinya BBPI

Berdasarkan pasal 668 Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, tanggal 2 Mei 1975, didirikan Pangkalan Armada Survei dan Eksplorasi Direktorat Jenderal Perikanan di Semarang. Sesuai dengan beban tugas yang diberikan, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 308/Kpts/Org/1978, tanggal 1 April 1978, maka Pangkalan Armada Survey tersebut ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang perikanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan.

Seiring dengan perkembangan akan tugas yang diemban, maka terbitlah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.26G/MEN/2001, tanggal 01 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang. Tahun 2006, Balai Pengembangan Penangkapan Ikan meningkat statusnya dari eselon III a menjadi eselon II b (Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan), dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/2006 tanggal 12 Januari 2006, tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI).

Pada tahun 2014, nomenklatur Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan berubah menjadi Balai Besar Penangkapan Ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penangkapan Ikan.

2.2 Organisasi dan Ketatalaksanaan

Tugas pokok dan fungsi BBPI (Balai Besar Penangkapan Ikan), sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 19/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPI sebagai berikut :

BBPI mempunyai tugas melaksanakan uji terap, penyebarluasan, teknologi pemanfaatan sumber daya ikan, pelayanan dan kerja sama teknis, pengujian dan sertifikasi, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penangkapan ikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang penangkapan ikan;
- b. Pelaksanaan kerjasama teknis di bidang penangkapan ikan;
- c. Pelaksanaan dan penyebarluasan uji terap habitat sumber daya ikan;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan penerapan dan penyebarluasan uji terap teknik sarana penangkapan ikan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi dan sertifikasi di bidang penangkapan ikan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai besar.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, BBPI ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut:

A. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan

Kepala Balai bertugas untuk memimpin tugas dan fungsi organisasi sebagaimana telah disebutkan diatas. Kepala Balai Besar mempunyai eselon II B.

B. Pejabat Eselon III B

Pejabat Eselon III B sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari :

1) Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, tata laksana, rumah tangga, barang milik negara, dan ketatausahaan, hubungan masyarakat, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan di lingkungan BBPI.

2) Kepala Bidang Uji Terap Teknik Pemanfaatan Sumberdaya Ikan

Kepala Bidang Uji Terap mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, inventarisasi, analisis, penerapan, penyebarluasan, dan uji terap teknik sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan.

Bidang Uji Terap Teknik Pemanfaatan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, dan analisis uji terap teknik sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan;
- b. Pelaksanaan uji terap teknik sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan;
- c. Pelaksanaan penyebarluasan teknik sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan yang ramah lingkungan; dan
- d. Pelaksanaan bimbingan teknik pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

3) Kepala Bidang Dukungan dan Kerjasama Teknik

Kepala Bidang Dukungan dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa sarana uji terap sarana penangkapan dan habitat sumber daya ikan, bimbingan teknis penangkapan ikan, kerja sama teknis, serta pengelolaan dan pelayanan sistem informasi penangkapan ikan.

Bidang Dukungan dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan jasa sarana uji terap sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan;
- b. pelaksanaan kerjasama teknis penangkapan ikan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis penangkapan ikan; dan
- d. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi penangkapan ikan.

4) Kepala Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk

Kepala Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk mempunyai tugas melaksanakan pengujian kelayakan teknis sarana penangkapan dan habitat sumber daya ikan, penyiapan bahan standardisasi, serta sertifikasi pengelolaan penangkapan ikan.

Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian kelayakan teknis sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan; dan
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan.

C. Pejabat Eselon IVa

Pejabat Eselon IVa sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari:

1) Di bawah Kepala Bagian Tata Usaha

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, ketatalaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penangkapan ikan, meliputi:

- Menyiapkan usulan rencana program kerja/kegiatan tahunan dan lima tahunan;
- Melakukan koordinasi dengan pejabat fungsional dan kepala bidang dalam penyiapan usulan rencana kerja tahunan, lima tahunan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi program kerja/kegiatan;
- Mengkoordinir penyusunan Renstra BBPI Semarang;
- Membuat laporan bulanan, tahunan BBPI Semarang;
- Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP);
- Menghimpun, mengkompilasi usulan kegiatan pejabat fungsional dan kepala bidang dalam penyiapan usulan kegiatan;
- Memberikan penilaian staf;
- Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pekerjaan secara periodik.

b. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, kehumasan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan, dan kenyamanan, meliputi :

- Menyiapkan usulan rencana kebutuhan pegawai yang meliputi formasi, mutasi dan pensiun pegawai ;
- Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data kepegawaian ;
- Menyiapkan dan memproses mutasi kepegawaian yang meliputi usulan; Pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, pembebasan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil ; pengusulan, karpeg, karis dan karsu, askes, kartu taspen;
- Memproses pemberian cuti pegawai serta perijinan yang berkaitan dengan kepegawaian ;

- Mengumpulkan data untuk penyusunan rencana pengembangan pegawai meliputi pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, promosi dan pemberian penghargaan atau tanda jasa ;
- Menyiapkan bahan evaluasi daftar hadir pegawai ;
- Menyusun DUK (Daftar Urut Kepangkatan), daftar nominative pegawai dan membuat laporan/perubahan status pegawai meliputi : perkawinan, kelahiran, perceraian dan kematian;
- Menghimpun, mendokumentasikan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai ;
- Memberikan penilaian Staf ;
- Melakukan koordinasi dengan bidang dan seksi dilingkup BBPI ;
- Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pekerjaan secara periodik.
- Melakukan pengiriman surat keluar baik yang meliputi pencatatan dan penyampaian langsung maupun pengiriman melalui pos/angkutan jasa lain;
- Melakukan penomoran dan stempel durat dinas keluar;
- Melakukan penggandaan surat, naskah dan dokumen;
- Melaksanakan kegiatan pencatatan barang/alat rumah tangga, dan sarana prasarana;
- Melaksanakan kegiatan perawatan, pemeliharaan barang, peralatan/sarana prasarana kantor, gedung kantor ;
- Melakukan pengelolaan surat masuk yang meliputi pengambilan dan penerimaan surat, penyotiran, pencatatan dan pendistribusian surat;
- Melakukan penyimpanan, perawatan, penyusutan dan usul penghapusan arsip;

c. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi keuangan, sistem akuntansi instansi, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), meliputi :

- Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan administrasi keuangan, perlengkapan;
- Menyiapkan penyusunan daftar gaji, lembur, honorarium dan memantau pembayarannya;
- Memonitor dan menyajikan data penerimaan PNBP ;
- Melakukan verifikasi antara lain : memeriksa/meneliti kebenaran pengeluaran bendahara baik UP, TUP (uang yang harus dipertanggung jawabkan) maupun LS (langsung) ;
- Memberikan penilaian DP3 staf ;
- Melakukan koordinasi dengan bidang dan seksi dilingkup BBPI Semarang;
- Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pekerjaan secara periodik.

2) Di bawah Kepala Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk

a. Kepala Seksi Pengujian Produk

Kepala Seksi Pengujian Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan uji terap dan standarisasi kelayakan teknis kapal perikanan, alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan, habitat sumber daya ikan, dan operasi penangkapan ikan, meliputi:

- Menyusun bahan rencana standarisasi di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan operasi penangkapan ikan;
- Mengusulkan kegiatan inventarisasi, identifikasi, kajian, perekayasa dan survey dibidang kapal perikanan, alat penangkap ikan dan daerah penangkapan ikan yang dibuat oleh pejabat fungsional;
- Mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan penyiapan bahan standar baku dibidang kapal perikanan, alat penangkap ikan dan daerah operasi penangkapan ikan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan pengujian bahan standar dibidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan di daerah operasi penangkapan ikan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan pengujian operasi penangkapan ikan di daerah operasi penangkapan ikan;
- Menyiapkan bahan RSNI di bidang kapal perikanan, alat penangkap ikan dan daerah operasi penangkapan ikan;
- Menyiapkan rancangan peraturan menteri kelautan dan perikanan dalam rangka penerapan RSNI di bidang kapal perikanan, alat penangkap ikan dan daerah penangkapan ikan;
- Melakukan sosialisasi RSNI ke masyarakat perikanan tangkap;
- Melakukan koordinasi dengan bagian/bidang dan sub bagian/seksi dilingkup BBPI Semarang;
- Memberikan penilaian staf;
- Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pekerjaan secara periodik.

b. Kepala Seksi Sertifikasi Produk

Kepala Seksi Sertifikasi Produk mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan sertifikasi kapal perikanan, alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta tenaga kerja perikanan tangkap di bidang penangkapan ikan. meliputi:

- Menyiapkan bahan sertifikasi di bidang kapal perikanan, alat penangkapa ikan, standart operasi penangkapan, pengawakan kapal dan tenaga kerja perikanan tangkap;
- Menyiapkan bahan akreditasi lembaga sertifikasi di bidang kapal perikanan, alat tangkap ikan, daerah operasi penangkapan ikan, standar operasi penangkapan ikan, pengawakan kapal dan tenaga kerja perikanan tangkap;
- Melakukan sertifikasi dibidang kapal perikanan, alat tangkap ikan, daerah operasi penangkapan ikan, pengawakan kapal;
- Mengusulkan lembaga sertifikasi sarana penangkapan ikan bagi kapal perikanan, untuk diakreditasi ke Komite Akreditasi Nasional;
- Melakukan bimbingan teknis lembaga sertifikasi sarana penangkapan ikan;

- Melakukan bimbingan penerapan sertifikasi sarana penangkapan ikan;
- Melakukan penyerasian dan pengendalian standart di bidang kapal perikanan, alat tangkap dan daerah operasi penangkapan ikan;
- Melakukan bimbingan dan verifikasi sertifikasi di bidang kapal perikanan, alat tangkap dan daerah operasi penangkapan;
- Menyiapkan data sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi;
- Melakukan koordinasi dengan bagian/bidang dan sub bagian/seksi ilingkup BBPI Semarang;
- Memberikan penilaian staf;
- Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pekerjaan secara periodik

3) Di bawah Kepala Bidang Dukungan dan Kerjasama Teknik

a. Kepala Seksi Dukungan Teknik

Kepala Seksi Dukungan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa uji terap sarana penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan, serta pengelolaan dan pelayanan sistem informasi penangkapan ikan, meliputi:

- Meyiapkan bahan pengelolaan system jaringan dan pelayanan jasa di bidang pengembangan penangkapan ikan;
- Melakukan perawatan operasional mesin-mesin, alat tangkap, bengkel/workshop, alat simulasi dan fishing simulator;
- Melakukan pemeliharaan, perbaikan kapal dan alat bantu;
- Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana;
- Mengatur pemanfaatan dermaga dan penempatan sandar kapal;
- Melakukan monitoring dan pelayanan pengisian perbekalan kapal;
- Melakukan monitoring dan pelayanan surat-surat kapal;
- Menyiapkan bahan biaya tambat jasa/labuh kapal dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan seksi dukungan teknik;
- Melakukan koordinasi kerja dengan bagian/bidang dan subbagian/seksi di lingkup BBPI Semarang;
- Memberikan penilaian staf;
- Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pekerjaan secara periodik.

b. Kepala Seksi Kerjasama Teknik

Kepala Seksi Kerjasama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis, dan bimbingan teknis penangkapan ikan, meliputi :

- Menyiapkan bahan penyusunan konsep kerjasama/perjanjian dibidang teknologi penangkapan ikan;
- Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (dalam negeri/luar negeri), dalam hal pemanfaatan teknologi penangkapan ikan;

- Melakukan pengelolaan, pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan sarana dan prasarana yang dikerjasamakan;
- Melakukan pendataan dan pemantauan terhadap perkembangan kerjasama;
- Memfasilitasi, mengkoordinasikan serta melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan kerjasama;
- Melakukan monitoring atas pelaksanaan program kerjasama;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan atas pelaksanaan program kerjasama;
- Melakukan koordinasi kerja dengan bagian/bidang dan subbagian/seksi di lingkup BBPI Semarang;
- Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- Memberikan penilaian staf;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pekerjaan secara periodik.

4) Di bawah Kepala Bidang Uji Terap Teknik Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

a. Kepala Seksi Uji Terap Teknik Sarana Penangkapan Ikan

Kepala Seksi Uji Terap Teknik Sarana Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, analisis pelaksanaan, dan penyebarluasan hasil uji terap teknik sarana penangkapan ikan, serta bimbingan teknis di bidang teknik sarana penangkapan ikan, meliputi :

- Menyiapkan bahan bimbingan (termasuk materi pelatihan, maket alat tangkap dsb) dibidang teknologi perikanan tangkap;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan mengidentifikasi kebutuhan teknologi perikanan tangkap di daerah-daerah;
- Melaksanakan penyebaran teknologi perikanan tangkap melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan gelar teknologi;
- Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas teknis, pelajar/mahasiswa dan masyarakat perikanan di BBPI Semarang;
- Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- Memberikan penilaian staf;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pekerjaan secara periodik.

b. Kepala Seksi Uji Terap Habitat Sumber Daya Ikan

Kepala Seksi Uji Terap Habitat Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, analisis pelaksanaan dan penyebarluasan hasil uji terap habitat sumber daya ikan serta bimbingan teknis di bidang pemanfaatan sumber daya ikan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab, meliputi :

- Melaksanakan penyiapan bahan informasi dan publikasi, meliputi pembuatan poster, leaflet, panel pameran, buku, jurnal dan audio visual dibidang habitat SDI;
- Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan kegiatan perikanan tangkap melalui demonstrasi, gelar teknologi dan pameran;
- Melaksanakan introduksi hasil teknologi habitat SDI kedaerah-daerah yang belum berkembang;

- Mengumpulkan/menghimpun dan mendokumentasikan bahan-bahan informasi, buku-buku serta memberikan pelayanan perpustakaan;
- Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan instansi terkait (kehumasan);
- Melaksanakan pengelolaan jaringan informasi;
- Memberikan penilaian staf;
- Melakukan koordinasi dengan bidang dan sub bidang/seksi dilingkup BBPI Semarang;
- Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pekerjaan secara periodik.

Tiap Kepala Bagian / Seksi dibantu oleh Pelaksana.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBPI terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Teknis dan non-Teknis. Kelompok Jabatan Fungsional Teknis di lingkungan BBPI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan teknik penangkapan ikan, perekayasa, pengujian, penerapan standar kapal perikanan dan alat penangkap ikan serta sertifikasi sarana penangkapan ikan, identifikasi daerah penangkapan, musim ikan, cara penangkapan, rehabilitasi lingkungan perairan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

1) Fungsional Perekayasa

Organisasi Fungsional Kerekayasa dipimpin oleh seorang Kepala Program yang bertanggung jawab penuh kepada BBPI. Organisasi Fungsional Kerekayasa dapat diubah-ubah bentuk dan pelakunya tergantung kepada kebutuhan program setiap fasa. Kepala Program adalah Program Inisiator yang memberikan arahan tentang garis-garis besar kegiatan termasuk: *state of the art technology*, strategi keuangan program, maupun eksekusinya.

Secara rinci tugas Kepala Program adalah sebagai berikut :

- Melakukan perencanaan program bersama *Program Manager* dan *Chief Engineer*;
- Membentuk organisasi program, menentukan jumlah *Work Breakdown Structure (WBS)* dan jumlah *Work Package* untuk setiap WBS;
- Mengangkat personil – personil yang terlibat dalam program serta pejabat-pejabat fungsional atas usulan *Chief Engineer*, dan *Program Manager*;
- Mendiskusikan pelaksanaan program ditinjau dari segi teknik ketepatan waktu dan pendanaan secara berkala bersama para *Group Leader*, *Program Manager* dan *Chief Engineer*;
- Memberikan saran-saran pada setiap fasa program review: *Preliminary*, *Detail*, *Critical* dan *Final Program Review*;

- Melaporkan pelaksanaan program serta mempertanggung jawabkan hasil program kepada kepala unit struktural (pimpinan terkait) yang memberi pekerjaan secara berkala;
- Memberikan presentasi mengenai program berjalan;
- Memperagakan hasil-hasil program;
- Mempresentasikan serta mempertahankan usulan Hak Atas Kekayaan Intelektual di hadapan yang berwenang;
- Menyetujui *Program Manual / Design Manual / Engineering Manual / Test Manual / Production Manual/ Technical Document/ Program Document*, dan *Progress Control and Monitoring*.

2) Fungsional Litkayasa

Fungsional Litkayasa bertugas dan bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada BBPI. Pejabat Fungsional Teknisi Litkayasa sesuai pasal 4 Keputusan Menpan Nomor 23/KEP/M.PAN/2/2003, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan. Tugas pokok tersebut dibagi sesuai dengan jenjang Jabatan Teknisi Litkayasa, yaitu :

1. Jenjang Teknisi Litkayasa Penyelia.

Memiliki rincian tugas pokok sebagai berikut:

- Menyusun rencana percobaan;
- Menganalisa hasil percobaan;
- Menganalisa hasil survei;
- Merencanakan kebutuhan pembuatan proses system/model/prototipe;
- Melakukan pengawasan kegiatan pelayanan Perekayasaan;
- Melakukan layanan informasi teknis ilmiah;
- Melakukan peningkatan fungsi alat dan fasilitas;
- Melakukan penjaminan mutu laboratorium/fasilitas;
- Melakukan penyuluhan penerapan hasil penelitiandan perekayasaan;
- Menganalisa hasil pengujian unjuk kerja produk Perekayasaan; dan
- Melakukan supervisi pemrosesan hasil penelitian perekayasaan.

2. Jenjang Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan.

Memiliki rincian tugas pokok sebagai berikut:

- Menyusun kebutuhan percobaan;
- Menyusun kebutuhan survei;
- Melakukan penyetelan dan pengujian rangkaian pembuatan proses/system/model/prototipe;
- Melakukan pembuatan bagian-bagian prototipe;
- Menguji bahan unjuk kerja alat;
- Melakukan penyetelan dan kalibrasi alat;
- Membuat bahan audio visual; dan
- Melakukan pemrosesan laporan.

3. Jenjang Teknisi Litkayasa Pelaksana.

Memiliki rincian tugas pokok sebagai berikut:

- Melakukan pengamatan/pengukuran obyek percobaan;
- Mengolah data percobaan;
- Mengelompokkan data survei obyek percobaan data survei;
- Menyusun rangkaian pembuatan proses/system /model/prototipe;
- Melakukan pengukuran analisis;
- Memperbaiki alat dan fasilitas;
- Membuat alat peraga dan maket;
- Memandu kegiatan promosi Iptek; dan
- Membuat gambar, diagram dan peta.

4. Jenjang Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula

Memiliki rincian tugas pokok sebagai berikut:

- Menyiapkan kebutuhan percobaan;
- Mengumpulkan data;
- Menyiapkan kebutuhan pembuatan proses/system/model/prototipe;
- Mengambil dan memproses contoh;
- Memelihara alat dan fasilitas;
- Menyiapkan bahan penyusunan brosur, leaflet, booklet;
- Melakukan pelayanan pemrosesan hasil penelitian; dan
- Melakukan pelayanan pemrosesan dan hasil perekayasaan.

3) Fungsional Arsiparis,

4) Fungsional Pranata Komputer,

5) Fungsional Pustakawan,

6) Fungsional lain.

Jumlah dan jenis tenaga fungsional pengembangannya disesuaikan dengan pengembangan lembaga.

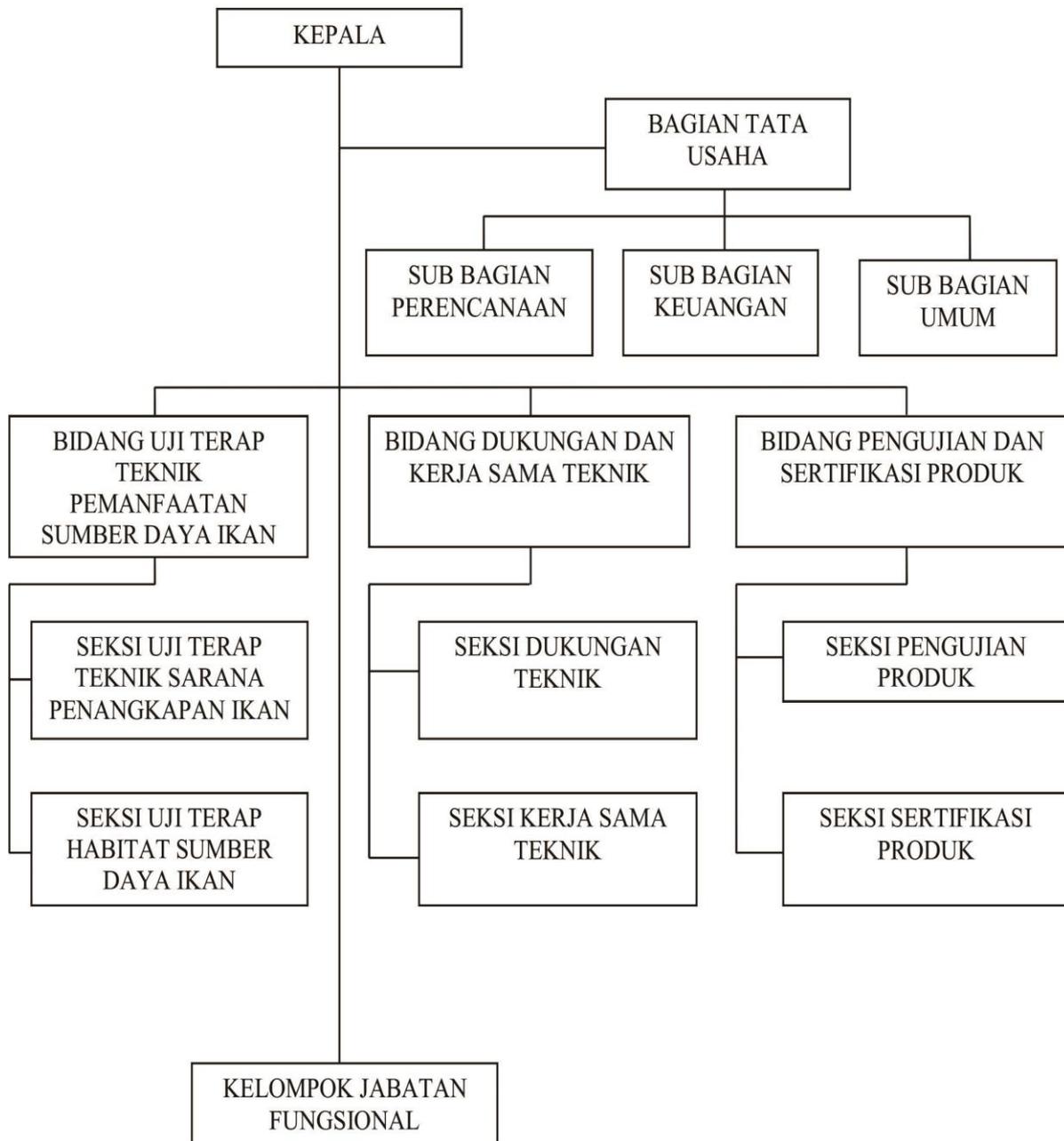
2.3 Tata Kerja

Tata Kerja Balai Besar Penangkapan Ikan sebagaimana terdapat dalam Permen Nomor PER.19/PERMEN-KP/2014 tanggal 16 Mei 2014 adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

- a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BBPI; dan
- b. Mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 25, dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh pimpinan satuan organisasi yang berada dibawahnya dan dalam pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- e. Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- f. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Berikut ini adalah struktur organisasi Balai Besar Penangkapan Ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2014





Gambaran Pelayanan BBPI Semarang

Kondisi Eksisting.....	21
Standar Pelayanan Minimal.....	24
Kondisi yang Diinginkan BBPI.....	25

3.1 Kondisi Eksisting

Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, harus mampu menampung kegiatan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Balai Besar Penangkapan Ikan, khususnya dalam hal pengembangan teknologi penangkapan ikan secara utuh, maka untuk pelestarian sumberdaya ikan dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya

perikanan secara bertanggung jawab dan diperlukan pengawasan terhadap sumberdaya perikanan.

Dalam rangka mendukung fungsinya dalam hal pemanfaatan sumberdaya perairan yang cukup beragam dan luas, peran BBPI tidak hanya perlu dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengembangan teknologi perikanan tangkap dengan berbagai aspeknya, namun diperlukan juga kewenangan yang cukup, sumberdaya manusia yang terampil dan dukungan sarana dan dana yang memadai.

Kondisi aktual dari Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) sampai dengan saat ini adalah:

- 1) Jumlah pegawai BBPI sebanyak 121 orang terdiri dari 95 orang PNS dan 26 orang tenaga kontrak. Dari jumlah tersebut, 13% merupakan tenaga fungsional tertentu (perekayasa, litkayasa, statistisi, arsiparis dan pranata humas), mayoritas adalah golongan III atau penata sejumlah 75% dan pendidikan terbanyak adalah lulusan S-1 (32%). Sekitar 2% pegawai BBPI saat ini sedang menempuh pembinaan tugas belajar, sedangkan sisanya sebagian telah menempuh pendidikan dan pelatihan pegawai, demi peningkatan kualitas SDM di BBPI.

BBPI Semarang banyak memberikan kesempatan kepada para pejabat fungsional untuk lebih menguasai dan profesional dalam melaksanakan tugasnya melalui kegiatan-kegiatan kerekayasaan, apresiasi dan menjadi instruktur bagi mahasiswa /dosen/guru SMK/ staf Dinas Kelautan maupun UPT lingkup KKP serta para nelayan yang magang dan studi banding di BBPI Semarang.



Kegiatan Seminar di lingkungan BBPI

Beberapa personil (khususnya tenaga teknis) yang tengah memasuki masa pensiun serta kualitas SDM (terutama pada kemampuan melakukan negosiasi, membuat suatu sistem jaringan, kemampuan bahasa asing, kepustakaan dan teknis fungsional), dirasakan saat ini menjadi faktor kelemahan. Hal-hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kinerja BBPI, mengingat akan timbul resiko terjadi kesenjangan dalam regenerasi kepegawaian dan resiko tantangan pemenuhan tupoksi BBPI ke depan yang makin berat.

Kegiatan Perencanaan, Keuangan dan Umum, telah dilakukan dengan cukup baik meskipun perlu peningkatan dalam jumlah bahan, materi dan koordinasi untuk penyusunan rencana serta program kerja BBPI.



KM Trevally kapal survei milik BBPI

- 2) Sarana dan prasarana di BBPI saat ini sebagian besar dalam kondisi yang baik. Luas tanah persil perumahan mencapai 3.621 m² sedangkan luas bangunan

gedung kantor dan sarana lain mencapai lebih kurang 8.000 m². Pada saat sekarang telah tersedia gedung laboratorium penangkapan ikan, seluas lebih kurang 400 m². Sebagian besar alat angkutan darat dan laut, alat-alat *workshop*, alat penyimpanan, inventaris kantor-rumah tangga, alat komunikasi, peralatan perikanan, dan alat laboratorium umum dalam keadaan baik.

- 3) Dalam menjalankan fungsinya untuk penyebaran teknologi dan informasi, BBPI aktif melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terhadap petugas teknis daerah, mahasiswa, siswa SMK, nelayan, pihak swasta dan *stakeholder* lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi : kunjungan/studi banding, magang/praktek kerja, dan pelatihan dari instansi luar.



Kegiatan bimbingan teknis pembuatan rumpon

Untuk menunjang fungsi kegiatan diseminasi, BBPI telah menyusun bahan informasi dan publikasi, melalui media cetak, elektronik (*website*) maupun melalui gelar teknologi, pameran - pameran /*exhibition*. Media cetak hasil publikasi BBPI Semarang berupa: buku petunjuk teknis, poster, *leaflet*, brosur, *banner*, *booklet*, agenda teknologi serta jurnal ilmiah Ariomma.



Kegiatan pameran di Hari Nusantara 2014 di Kotabaru

- 4) Pelayanan Teknis untuk pengembangan teknologi penangkapan ikan, telah banyak dilakukan oleh BBPI melalui kegiatan-kegiatan : pelayanan sarana dan armada; diseminasi dan penyuluhan; *training*, *bridge-simulator*, *workshop*; serta pengembangan kerjasama (*MoU*) dengan instansi, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait.

Pemanfaatan hasil kegiatan BBPI bagi nelayan, meliputi : pendidikan dan pelatihan teknis, penyuluhan dan penyebaran informasi, perekayasa peralatan, rancang bangun dan/atau kerekayasa dalam pengembangan teknologi inovatif dan produktifitas penangkapan ikan, serta survey kelautan.



Sarana Bridge Simulator di BBPI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya, BBPI Semarang telah banyak menyiapkan serta *up-dating database* bahan standar hasil pengembangan perekayasa sarana penangkapan ikan yang ditujukan untuk peningkatan efisiensi, selektifitas dan mutu hasil tangkapan dan dapat diterima oleh masyarakat serta dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam perumusan kebijakan dalam rangka

pengelolaan perikanan tangkap yang bertanggungjawab, dengan *outcome* yang dihasilkan adalah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI). Jumlah RSNI yang sudah disusun sampai tahun 2019 mencapai 420 bahan, (s.d. 2008 sebanyak 164 dan 2011-2019 sebanyak 256 bahan) yang terus dilakukan penjenjangan menjadi SNI. SNI pun secara rutin dilakukan kaji ulang, revisi dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan dan kondisi aktual masyarakat.



Kegiatan Workshop Penyiapan Laboratorium Pengujian Sarana Penangkapan Ikan



Praktek Pengukuran Konstruksi Kapal Ikan

Selain standarisasi, BBPI juga telah banyak melakukan kegiatan penyiapan bahan sertifikasi hasil pengujian sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal dan tenaga kerja perikanan tangkap, agar terjadi peningkatan efisiensi, efektifitas, selektifitas, dan mutu hasil tangkapan yang dapat diterima oleh masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman perumusan kebijakan, dalam rangka pengelolaan perikanan tangkap yang bertanggung jawab.

3.2 Standar Pelayanan Minimal

Proyeksi kondisi jangka menengah Balai Besar Penangkapan Ikan ke depan pada tahun 2020 – 2024, akan berdasar pada standar pelayanan minimal yang telah dicapai pada periode-periode sebelumnya. Standar pelayanan minimal tersebut sangat terkait dengan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang pelayanan.

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib aparatur yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai (*benchmark*). SPM pada hakekatnya adalah *pengejawantahan* dari Prosedur Operasional Standar dengan penambahan atribut mutu. Mutu tersebut akan selalu dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi secara temporal. Dari uraian tersebut, nampak bahwa SPM sangat relevan dengan proyeksi kondisi pelayanan Balai Besar Penangkapan Ikan dalam jangka 4 (empat) tahun ke depan. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan bersifat internal dan eksternal. Standar Pelayanan Minimal tersebut dapat dilihat di Lampiran 2.

3.3 Kondisi yang Diinginkan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) dan Proyeksi ke Depan

Berkaca terhadap kondisi eksisting Balai Besar Penangkapan Ikan saat ini, sasaran pembangunan bidang penangkapan ikan yang diinginkan pada tahun 2020 – 2024 secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis standar nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan sebanyak 116 dokumen sampai dengan 2024;

Demi peningkatan jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis standar nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan, sasaran internal yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan jumlah rekomendasi teknis sarana penangkapan ikan dan habitat SDI yang dapat dimanfaatkan masyarakat dari kegiatan uji terap, sebanyak 35 rekomendasi teknis sampai 2024;
- b) Mengintensifkan proses penyusunan bahan standar dan sertifikasi sarana penangkapan ikan, sebanyak 35 bahan sampai 2024
- c) Meningkatkan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan, sebanyak 17 kegiatan, sampai dengan 2020.

Perincian kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel III.2.

Tabel III.1

Indikator Sasaran Strategis atas Renstra Balai Besar Penangkapan Ikan

Tahun 2020 – 2024

TAHUN	JUMLAH REKOMENDASI TEKNIS, RANCANGAN TEKNIS STNADAR NASIONAL INDONESIA, SERTIFIKASI DAN KERJASAMA PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN
	Jumlah
2020	16
2021	19
2022	23
2023	27
2024	31



Bab 4

Isu-isu Strategis

Potensi.....	26
Permasalahan.....	31
Peluang.....	32

4.1 Potensi

Capaian pembangunan Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2015-2019 didasarkan pada realisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pembangunan perikanan tangkap. Pembangunan perikanan tangkap memiliki 3 sasaran strategis utama yakni 1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan; 2) terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, serta; 3) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Pertumbuhan PDB Perikanan

Rata-rata laju pertumbuhan PDB perikanan tahun 2015-2019 tercatat minus 5,02 persen per tahun. Laju penurunan terbesar terjadi pada periode tahun 2015-2016 dimana PDB perikanan turun dari 7,89 di tahun 2015 menjadi 5,15 di tahun 2016. Namun demikian terjadi kenaikan kembali di tahun 2017 dimana PDB perikanan tercatat sebesar 5,95. Capaian PDB Perikanan tahun 2017 ini juga merupakan capaian tertinggi pada periode 2016-2019 dimana capaian PDB Perikanan tahun 2018 dan tahun 2018 tercatat sebesar 5,20 dan 5,81. Penurunan laju pertumbuhan PDB perikanan disebabkan oleh penurunan daya beli (*purchasing power*) dari para pelaku sub sektor kelautan dan perikanan dan melemahnya permintaan domestik atas produk perikanan, yang merupakan penggerak utama ekonomi dan pertumbuhan investasi perikanan. Selain itu, penurunan laju pertumbuhan PDB perikanan juga disebabkan karena penerimaan pajak dan belanja pemerintah yang masih tergolong rendah.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Realisasi NTN tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,74 per tahun. Nilai tukar nelayan di tahun 2015 tercatat sebesar 106,14 meningkat cukup tinggi di tahun 2019 dimana tercatat sebesar 113,74. Meningkatnya capaian NTN tersebut sangat dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB), dimana indeks harga yang diterima nelayan mengalami peningkatan sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan.

Selama tahun 2019, NTN mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan nelayan. Indeks harga yang diterima nelayan (IT) mengalami kenaikan sebesar 3,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harga ikan mengalami peningkatan akibat perbaikan kualitas ikan yang diperjualbelikan. Sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan (IB) juga mengalami peningkatan sebesar 2,72 persen dimana peningkatan terbesar adalah indeks konsumsi rumah tangga sebesar 3,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh nelayan lebih kecil dibandingkan biaya yang diterima oleh nelayan.

Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Nelayan (RTP) per Bulan

Realisasi rata-rata pendapatan RTP tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni meningkat sebesar 16,05 per tahun, dimana pada tahun 2015 rata-rata pendapatan RTP tercatat sebesar Rp6,46 juta/bulan menjadi Rp10,65 juta/bulan pada tahun 2019. Peningkatan rata-rata pendapatan RTP ini ditunjang dengan peningkatan rata-rata pendapatan RTP Laut yang juga meningkat cukup tinggi dari Rp8,76 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp13,65 juta/bulan dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 15,37%. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan RTP Perairan Darat meningkat dari Rp2,13 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp3,57 juta/bulan di tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 13,44%.

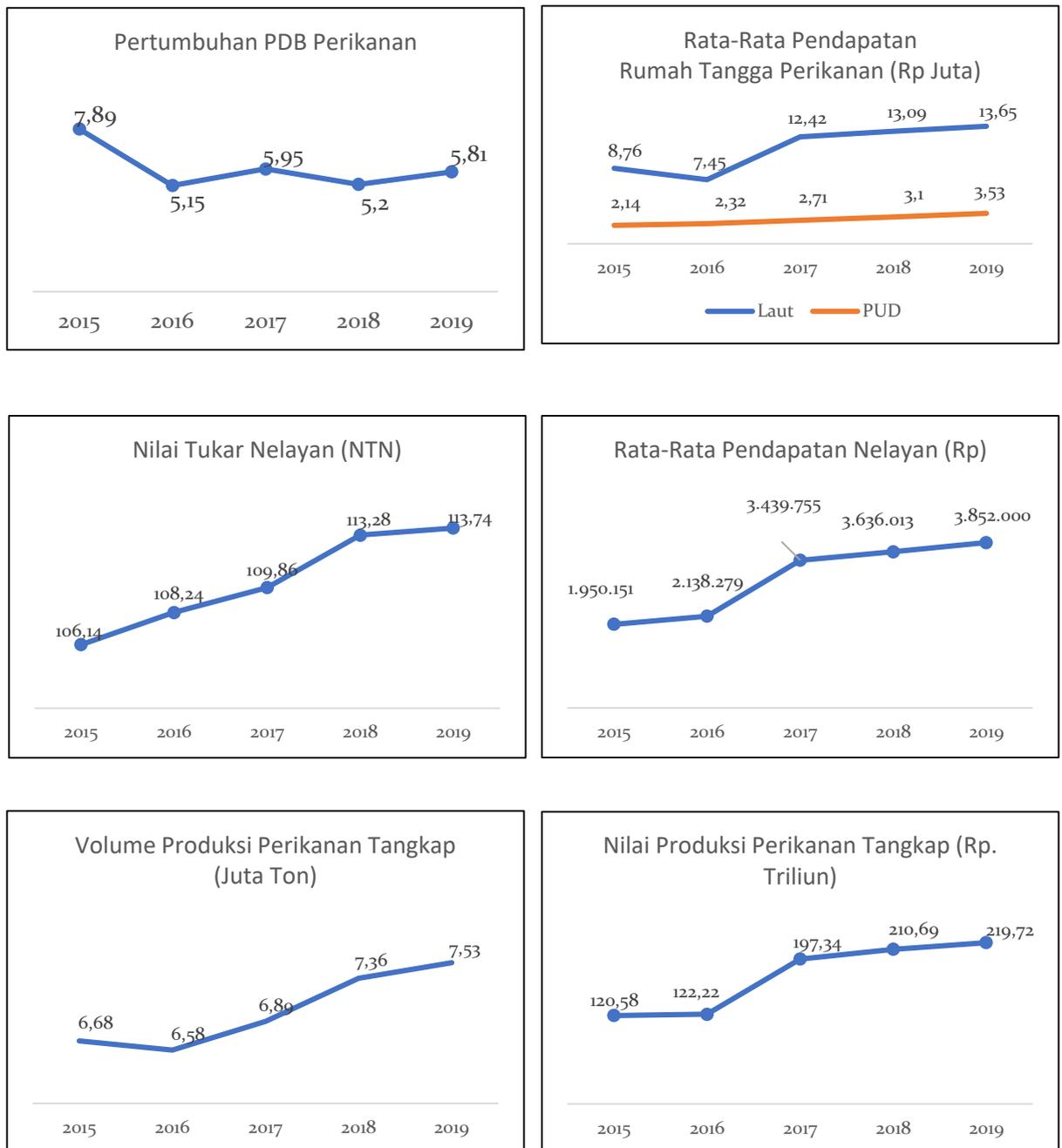
Rata-Rata Pendapatan Nelayan per Bulan

Tidak jauh berbeda dengan rata-rata pendapatan RTP, rata-rata pendapatan nelayan juga mengalami peningkatan yang cukup besar pada periode tahun 2015-2019 dengan peningkatan sebesar 20,54% per tahun. Rata-rata pendapatan nelayan tercatat sebesar Rp1,95 juta/bulan di tahun 2015 meningkat menjadi Rp3,85 juta/bulan di tahun 2019. Peningkatan rata-rata pendapatan nelayan ini ditunjang dengan peningkatan rata-rata pendapatan nelayan laut dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp2,17 juta/bulan menjadi Rp4,10 juta/bulan dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,91%. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan nelayan perairan darat tercatat sebesar Rp1,49 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp2,47 juta/bulan di tahun 2019 dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 13,34%.

Kenaikan rata-rata pendapatan nelayan ini menunjukkan afirmasi kebijakan untuk program perikanan tangkap telah dapat meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan pada periode tahun 2015-2019. Realisasi pendapatan nelayan berbanding lurus dengan realisasi NTN dimana realisasi rata-rata pendapatan nelayan akan mendukung langsung realisasi NTN pada periode yang sama, sehingga faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian NTN adalah relatif sama dengan faktor rata-rata pendapatan nelayan per bulan.

Volume Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi rata-rata volume produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 meningkat sebesar 3,11% per tahun. Volume produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 6,67 juta ton pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 7,53 juta ton pada tahun 2019. Peningkatan volume produksi ini ditunjang dengan peningkatan volume produksi perikanan laut dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 6,20 juta ton dan meningkat menjadi 6,98 juta ton di tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 3,05%. Sedangkan untuk volume produksi perikanan perairan darat juga meningkat dari 0,47 juta ton di tahun 2015 menjadi 0,55 juta ton di tahun 2019 dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,87% per tahun.



Gambar 1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen Perikanan Tangkap 2015-2019

Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Sedikit berbeda dengan realisasi volume produksi perikanan tangkap, realisasi rata-rata nilai produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 meningkat sebesar 18,47% per tahun. Nilai produksi perikanan tangkap tercatat sebesar Rp120,57 triliun di tahun 2015 meningkat signifikan menjadi Rp.219,72 triliun pada tahun 2019. Nilai

produksi perikanan tangkap di laut menyumbang sebagian besar dari capaian nilai produksi secara keseluruhan, dimana pada tahun 2015 nilai produksi perikanan tangkap di laut tercatat sebesar Rp110,05 triliun menjadi Rp202,03 di tahun 2019 dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 19,06%. Sedangkan untuk nilai produksi perikanan tangkap di perairan darat juga meningkat cukup signifikan dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp10,85 triliun dan meningkat menjadi Rp17,68 triliun pada tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 14,05%.

Capaian utama pembangunan perikanan tangkap juga ditopang oleh pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas seperti bantuan kapal perikanan, bantuan alat penangkapan ikan, bantuan premi asuransi nelayan, pengembangan kampung nelayan, fasilitasi sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan, penempatan observer di atas kapal perikanan, serta implementasi logbook penangkapan.

Selama tahun 2015-2019, sebanyak 2.513 kapal bantuan telah dibangun dan diserahkan kepada nelayan. Kapal perikanan dengan ukuran di bawah 30 GT disalurkan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan ukuran 30 GT ke atas. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan kecil agar dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang berlimpah. Adapun dalam kurun waktu yang sama, DJPT juga telah menyalurkan 18.142 paket Alat Penangkapan Ikan (API) bantuan bagi nelayan.

Dalam rangka perlindungan dan peningkatan kualitas hidup nelayan, telah disalurkan bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) kepada 1.198.177 orang nelayan. Sasaran BPAN adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Sedangkan risiko yang dijamin oleh asuransi adalah kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan. Selain itu dalam kurun waktu 2015-2019, telah dilakukan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan sebanyak 90.052 bidang, serta penataan kampung nelayan di beberapa lokasi permukiman nelayan. Untuk menjangkau cakupan penataan kampung nelayan yang lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir DJPT melibatkan peran aktif Perusahaan BUMN/swasta nasional melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Corporate Social Responsibility (CSR).

Pengembangan pelabuhan perikanan telah dilakukan pada 6 lokasi di tahun 2015 (PP Merauke, PP Lugu Simeuleu, PP Natuna, PP Teluk Awang, PP Untia, PP Tahuna), 9 lokasi di tahun 2017 (PPN Pengambang, PPN Palabuhanratu, PPN Ambon, PPN Ternate, PPN Pemangkat, PPP Pondok Dadap, PP Jayanti, PP Cikidang, PP Untia), serta 1 lokasi PP Cikidang di tahun 2019. Adapun dalam kurun waktu 2015-2019, juga telah dilakukan pengembangan TPI Higienis di 31 lokasi pelabuhan perikanan di 17 provinsi.

Dalam rangka peningkatan sistem jaminan ketelusuran hasil tangkapan ikan, sekaligus memperkuat fungsi pendataan, pada tahun 2019 tercatat 347 kapal

perikanan telah ditempati oleh *observer on board*. Selain itu upaya penerapan logbook penangkapan ikan terus didorong, dimana pada tahun 2019 tercatat 5.887 kapal perikanan telah menerapkan logbook penangkapan ikan. Untuk semakin mempermudah penerapannya, mulai 1 November 2018 bahkan telah diterapkan sistem *e-logbook*.

4.2 Permasalahan

Masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia yang menyebabkan pengelolaan perikanan dan jasa kelautan belum optimal. Di sisi lain, terdapat pula permasalahan internal di BBPI yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- 1) Rendahnya kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan terutama karena tingkat pendidikan yang rendah;
- 2) Ketidakseimbangan pemanfaatan ikan antar WPP, serta status sumberdaya ikan di beberapa WPP sudah terindikasi *overfishing* dan penurunan daya dukung sumberdaya ikan;
- 3) Persepsi otonomi daerah yang belum sinergi sehingga timbul konflik pemanfaatan dan konflik antar nelayan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah;
- 4) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) di laut lepas belum optimal, karena keberagaman jenis SDI dan sarana penangkapan ikan belum didukung budaya nelayan yang maju;
- 5) Belum lengkapnya standardisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan awak kapal perikanan, serta kepatuhan pelaku usaha;
- 6) Dukungan rekayasa teknologi penangkapan belum optimal seperti penggunaan teknologi alat bantu penangkapan ikan ;
- 7) Wilayah kerja BBPI yang mencakup 11 WPP (seluruh nusantara), mengakibatkan kurang optimalnya pengembangan teknologi penangkapan ikan di daerah terpencil;
- 8) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang mengakibatkan tidak terkendalinya eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas petugas penegak hukum di lapangan;
- 9) Adanya kerusakan habitat vital di laut/pesisir yang disebabkan pencemaran, perusakan oleh manusia, maupun faktor bencana alam, akibat rendahnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem/lingkungan.
- 10) Menurunnya produksi perikanan tangkap, yang disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, rusaknya habitat vital, dan belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
- 11) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis;

- 12) Kurangnya *database* kondisi dan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia beserta perangkat penunjang analisis;
- 13) Era globalisasi dan pasar bebas yang mulai diterapkan tahun 2010 menuntut Indonesia sebagai negara produsen produk perikanan yang sesuai standar mutu dan layak ekspor;
- 14) Kinerja BBPI belum optimal, pemberdayaan sarana dan prasarana, kontinuitas dan sinergitas kegiatan kereyasaan serta rekrutmen Pegawai;

4.3 Peluang

Peluang merupakan kesempatan yang bisa diraih di masa mendatang berdasarkan potensi dan isu-isu strategis. Peluang tersebut adalah:

- 1). Peluang dan Potensi Eksistensi, SDM, Kompetensi dan Sarana-Prasarana Balai Besar Penangkapan Ikan

BBPI memiliki tugas dan fungsi strategis dalam bidang penangkapan ikan, yaitu melaksanakan pengembangan teknologi penangkapan ikan dan pelestarian sumberdaya ikan. BBPI memiliki sejumlah tenaga berpengalaman dalam bidang penangkapan ikan khususnya pada bidang fungsional perekayasa dan litkayasa, pemenuhan kebutuhan bahan standar, sertifikasi dan akreditasi, pengelolaan sistem jaringan dan pelayanan jasa serta kerja sama di bidang pengembangan penangkapan ikan serta pelaksanaan bimbingan, evaluasi, dan penyebarluasan teknologi, serta pengelolaan sistem informasi dan publikasi di bidang pengembangan penangkapan ikan. Sarana-prasarana yang dimiliki BBPI Semarang terus berkembang dari tahun ke tahun dari sejak berdirinya institusi awal di tahun 1978, hingga kini terus berkembang di segala aspek, baik dalam bentuk prasarana asrama, kelas, armada penangkapan dan alat tangkap, maupun sarana peralatan survei.

- 2). Kebutuhan masyarakat akan teknologi dan informasi penangkapan ikan
Kebutuhan informasi mengenai teknologi penangkapan ikan yang efektif, efisien serta ramah lingkungan oleh masyarakat saat ini dirasakan sangat tinggi. Permintaan masyarakat perikanan tangkap untuk memperoleh bahan bimbingan teknik penangkapan dari ke tahun ke tahun dirasakan terus meningkat, sehingga terbuka peluang bagi BBPI untuk meningkatkan penyediaan bahan bimbingan sesuai dengan tingkat pendidikan nelayan.
- 3). Kebijakan Pemerintah Pusat
Adanya kebijakan pemerintah pusat di berbagai aspek untuk peningkatan kesejahteraan nelayan sangat mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang. BBPI memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi penangkapan ikan yang diperlukan dalam pencapaian program yang ditetapkan.
- 4). Kepercayaan Pihak Luar/Kerjasama Kemitraan

Sudah terjalinnya kerjasama serta kepercayaan dari pihak dalam maupun luar negeri terhadap BBPI Semarang dalam bidang survey, kajian, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknik.

- 5). Potensi sumber daya Ikan
Potensi sumber daya ikan tangkapan masih dirasakan sangat besar terutama di perairan laut dalam. Kondisi sumberdaya ikan selain perairan umum daratan juga berpeluang untuk dimanfaatkan dengan penerapan teknologi penangkapan yang memerhatikan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.
- 6). Potensi Sumberdaya Manusia Perikanan Tangkap
Kontribusi SDM nelayan terhadap tenaga kerja nasional cukup besar namun penyebarannya tidak merata. Secara individual, untuk daerah tertentu kualitasnya masih rendah dan transformasi teknologi modern belum optimal, sehingga diperlukan pembinaan dengan pendekatan kelompok. Di sisi lain SDM penyuluh perikanan tangkap jumlahnya belum mencukupi dalam menunjang sinergitas BBPI sebagai pusat teknologi penangkapan ikan yang inovatif dan adaptif.
- 7). Dukungan dari berbagai instansi
Letak geografis BBPI sangat strategis berada di Ibukota Propinsi Jawa Tengah yang posisinya merupakan sentral / barometer perikanan tangkap di Indonesia, mendapatkan dukungan dari berbagai instansi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas BBPI Semarang, antara lain:
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, terutama yang memiliki wilayah pantai
 - Balai Penelitian dan Standarisasi Industri dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan;
 - Galangan kapal;
 - Pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - Perusahaan perikanan tangkap skala kecil, sedang maupun besar;
 - Fakultas Kelautan dan Perikanan serta Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan;
 - Pusat pendaratan ikan, dan pasar ikan.
- 8). Wilayah kerja di seluruh Indonesia
Wilayah kerja yang mencakup seluruh nusantara, merupakan potensi pengembangan teknologi, sistem informasi, standarisasi dan sertifikasi dalam kegiatan penangkapan ikan di daerah-daerah terpencil. Wilayah kerja yang meliputi seluruh propinsi di Indonesia juga menjadikan eksistensi BBPI sebagai pusat pengembangan teknologi penangkapan ikan yang inovatif dan adaptif, menjadi lebih dibutuhkan dan dituntut kinerjanya secara lebih kompeten.
- 9). Otonomi Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, perkembangan di daerah semakin terbuka. Kewenangan Dinas-dinas di Propinsi dan Kabupaten/Kota semakin besar. Hal ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh Balai Besar Penangkapan Ikan untuk meningkatkan kemitraan.



Visi dan Misi

Visi	35
Misi.....	36

5.1 Visi

Visi adalah cita-cita, harapan, wawasan atau pandangan masa depan yang ingin dicapai. Visi ini memuat pernyataan umum yang mengungkapkan keinginan atau harapan semua pihak tentang masa depan pemanfaatan sumberdaya bagi kepentingan bersama. Melalui visi ini diharapkan dapat diwujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pengembangan kegiatan yang bersifat strategis, dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas , dan dorongan untuk pemanfaatan SDI yang kokoh, mandiri dan lestari, maka visi BBPI adalah :

“TERWUJUDNYA PENANGKAPAN IKAN YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”

5.2 Misi

Guna mencapai visi tersebut, Balai Besar Penangkapan Ikan sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan organisasi, fasilitas, keuangan dan SDM yang terintegrasi. **(M1)**;
2. Mewujudkan teknologi pemanfaatan SDI yang handal **(M2)**;
3. Meningkatkan pelayanan jasa, sistem informasi dan kerjasama di bidang teknologi perikanan tangkap **(M3)**;
4. Mewujudkan pengujian, penyiapan bahan standar di bidang sarana penangkapan dan habitat sumber daya ikan, serta sertifikasi pengelolaan penangkapan ikan yang mandiri dan handal **(M4)**.



Bab 6

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Pencermatan Lingkungan Eksternal dan Internal	37
Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	45
Penetapan Asumsi Strategis melalui SWOT	47
Penetapan Prioritas Asumsi Strategis Berdasarkan Tingkat Keterkaitan dengan Visi, Misi dan Nilai-Nilai	50
Penetapan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Pembahasan	53

6.1 Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dan Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE)

Rencana strategis pengembangan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) pada tahun 2020 – 2024 merupakan bentuk perencanaan jangka menengah selama lima tahunan yang cukup penting. Hal ini terkait dengan peranannya sebagai materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menuju ke proses pembenahan dan penyempurnaan program sebelum pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025. Sasaran utama RPJP adalah terwujudnya pembangunan perikanan tangkap yang

dilakukan secara terintegrasi dengan basis spasial berupa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Dalam penyusunan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, berbagai faktor strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan perlu diidentifikasi. Identifikasi tersebut didasarkan pada data dan informasi yang telah ada sebelumnya.

Faktor - faktor dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) yang menjadi variabel penentu keberhasilan pembangunan harus diidentifikasi dengan cermat dan lengkap. Kelengkapan data dan informasi yang menyangkut berbagai faktor yang berpengaruh tersebut menjadi acuan untuk menyusun perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan selama lima tahun ke depan.

Dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pentahapan identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (FKK) dengan menggunakan analisis SWOT, meliputi: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakneses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Hasil identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Balai Besar Penangkapan Ikan jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Penangkapan Ikan pada tahun 2020 – 2024, sebagai berikut :

6.1.1 Faktor Internal

I. Kekuatan (*Strength*)

1) Eksistensi peran Balai Besar Penangkapan Ikan

BBPI memiliki tugas dan fungsi strategis dalam bidang penangkapan ikan, yaitu melaksanakan pengembangan penangkapan ikan dan pelestarian sumberdaya ikan melalui pelaksanaan tugas – tugas : Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang penangkapan ikan dan pelestarian sumber daya ikan; Pelaksanaan standardisasi di bidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan serta operasi penangkapan ikan; Pelaksanaan sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap; Pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan pengembangan penangkapan ikan; Pelaksanaan pelayanan jasa dan kerja sama pengembangan penangkapan ikan; Pelaksanaan bimbingan, evaluasi, dan penyebarluasan teknologi di bidang pengembangan penangkapan ikan; dan Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi penangkapan ikan. Tujuan akhir adalah mewujudkan kesejahteraan bagi *stakeholders* dan *shareholders* perikanan tangkap dengan tetap bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Eksistensi tersebut tercermin pada visi BBPI sebagai pusat teknologi penangkapan ikan yang inovatif dan bertanggung jawab.

2) Potensi Sumber Daya Manusia yang Berpengalaman di Bidang Penangkapan Ikan

BBPI memiliki sejumlah tenaga berpengalaman dalam bidang penangkapan ikan. Profesionalitas tersebut terwujud pada kemampuan pelaksanaan tupoksi di bidang fungsional perekayasa dan litkayasa, pemenuhan kebutuhan bahan standar, sertifikasi dan akreditasi, pengelolaan sistem jaringan dan pelayanan jasa serta kerjasama di bidang penangkapan ikan serta pelaksanaan bimbingan, evaluasi, dan penyebarluasan teknologi, serta pengelolaan sistem informasi dan publikasi di bidang pengembangan penangkapan ikan. Pelaksanaan tupoksi tersebut telah dilaksanakan sejak didirikannya BBPI pada tahun 1978 dan terus berkembang sampai sekarang sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat perikanan tangkap.

3) Teknologi dan Informasi Penangkapan Ikan Melalui Kompetensi Kerekayasaan

Tenaga fungsional perekayasa dan litkayasa merupakan motor penggerak untuk melaksanakan pengembangan teknologi penangkapan ikan melalui perekayasaan. Arah pengembangan mengacu pada isu yang berkembang di masyarakat perikanan tangkap dengan didukung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga hasil pengembangan yang diperoleh tepat sasaran.

4) Sarana-Prasarana yang Mendukung

Sarana – prasarana yang dimiliki BBPI terus berkembang dari tahun ke tahun sejak berdiri tahun 1978, hingga kini terus berkembang di segala aspek, baik dalam bentuk prasarana asrama, kelas, armada penangkapan dan alat tangkap, maupun sarana peralatan survei. Potensi pemanfaatan infrastruktur teknis pendukung BBPI (laboratorium, lembaga sertifikasi mutu atau lingkungan, lembaga sertifikasi personil, dsb), mampu memberikan peluang untuk melakukan kerjasama pemanfaatan sarana seperti : pelatihan keterampilan pembuatan alat tangkap, perbengkelan, permesinan kapal, alat bantu penangkapan, alat bantu navigasi dan operasi penangkapan memanfaatkan armada BBPI. Peluang tersebut akan mendukung persiapan seluruh aspek pendukung untuk dapat berkompetensi dengan negara tetangga serta untuk mengusulkan penyusunan bahan-bahan acuan standar SNI dan sertifikasi.

Sarana dan prasarana tersebut didukung pula oleh kemampuan dan ketersediaan anggaran BBPI dalam mendata dan mengidentifikasi informasi mengenai berbagai keperluan, kebutuhan teknologi masyarakat perikanan tangkap. Sarana dan prasarana juga mendukung kemampuan mensosialisasikan hasil – hasil perekayasaan, standardisasi, sertifikasi dan kebijakan dalam penangkapan ikan.

5) Kuantitas Sumber Daya Manusia

Kuantitas atau jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki saat ini sekitar 121 (seratus dua puluh satu) orang terdiri dari tenaga struktural (administrasi dan teknis), fungsional perekayasa, dan fungsional litkayasa. Melihat tugas pokok dan fungsi yang diemban sekarang ini jumlah sumberdaya manusia yang ada cukup memadai, namun beban kerja juga bertambah sesuai dengan tugas dan fungsi (*job description*) dan tuntutan organisasi BBPI Semarang.

II. Kelemahan (*Weakness*)

1) Kinerja Organisasi BBPI

Banyak beban pekerjaan, kurangnya pemahaman pegawai perihal peraturan – peraturan bidang perikanan/kepegawaian yang berlaku, belum jelasnya alur dan koordinasi di lingkup seksi ataupun antar seksi yang berkaitan, belum optimalnya pentahapan rencana kerja yang sistematis dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sistem jaringan, serta kegiatan belum terjadwal dan terencana secara baik menjadikan organisasi kinerja dalam lingkungan BBPI dirasakan kurang optimal dan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.

2) Pembakuan Prosedur Operasional Standar (POS)

Prosedur Operasional Standar (POS) diperlukan mengingat masalah yang sering dihadapi BBPI yaitu kurang optimalnya mutu dan jumlah tangkapan yang disebabkan kurangnya pembakuan sistem mutu sarana penangkapan ikan. Upaya pembakuan POS ini memerlukan upaya-upaya sinkronisasi program standardisasi bidang perikanan tangkap, dengan melibatkan seluruh komponen pendukung, antara lain : Pemerintah (Pusat, Daerah, UPT Pusat, UPT Daerah), Pakar (Akademisi, Peneliti, Perekayasa), Produsen (Pabrik, Pengrajin) dan Konsumen (Nelayan, Pengusaha, *stakeholders*).

3) Pemberdayaan dan Kualitas SDM di bidang Penangkapan Ikan

Dengan tugas dan fungsi yang ada sekarang serta wilayah kerja seluruh Indonesia maka kualitas SDM BBPI Semarang saat ini perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas SDM tersebut terutama dirasakan pada seksi bimbingan teknis, informasi teknologi dan pejabat fungsional perekayasa.

Kualitas SDM yang belum optimal mengakibatkan masyarakat nelayan kurang mendapatkan bahan informasi, seperti : hasil kegiatan perekayasaan (ragam jenis, bentuk, desain dan ukuran sumberdaya ikan yang ramah lingkungan), standardisasi dan sertifikasi, yang dirasakan belum sesuai dengan kebutuhan *stake holder* serta belum didokumentasikan secara optimal.

4) Pemberdayaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki BBPI belum optimal dimanfaatkan. Penyebab - penyebab kondisi tersebut antara lain : kualitas SDM internal yang belum memadai dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, kurang optimalnya jejaring/kerjasama dengan pihak *stakeholders* dan *shareholders*, kurang optimalnya sinergi antar bagian yang mampu memberdayakan potensi kinerja BBPI yang ada sesuai tugas, fungsi dan kebutuhan masyarakat.

5) Kontinuitas dan Sinergitas Kegiatan Kerekayasaan

Kegiatan kerekayasaan memiliki fungsi penting dalam pencapaian seluruh tugas BBPI. Kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan rancang bangun dan atau kerekayasaan meliputi, perekayasaan dan pengoperasian bidang penangkapan ikan kurang optimal. Program-program kegiatan eksplorasi,

survey, observasi, serta kajian lanjutan teoritikal dan eksperimental, studi kelayakan serta komparasi sistem teknologi penangkapan ikan, perancangan kebijakan dan parametrik kajian teknologi, desain awal dan pengujian teknologi penangkapan ikan, pembuatan produk melalui perakitan dan integrasi prototipe, uji kinerja, uji standar dan sertifikasi teknologi penangkapan ikan dan penyusunan sistem uji operasional, engineering service, modifikasi dan pemeliharaan teknologi penangkapan ikan, dirasakan kurang optimal dirasakan oleh masyarakat perikanan tangkap. Hal ini disebabkan kegiatan-kegiatan tersebut masih bersifat parsial dan temporal, sementara sumberdaya ikan tangkapan bersifat dinamis, berkembang dan selalu berubah tiap waktu dan tiap lokasi penangkapan.

6.1.2 Faktor Eksternal

I. Peluang (*Opportunity*)

1) Kebutuhan Masyarakat yang Tinggi terhadap Teknologi dan Informasi di bidang Penangkapan Ikan

Kebutuhan informasi mengenai teknologi penangkapan ikan yang efektif, efisien serta ramah lingkungan oleh masyarakat saat ini dirasakan sangat tinggi. Identifikasi dan kajian BBPI mengenai sarana penangkapan pada 11 WPP termasuk perairan umum melalui kegiatan-kegiatan : eksplorasi, survey, observasi, serta kajian lanjutan teoritikal dan eksperimental, studi kelayakan, komparasi sistem teknologi penangkapan ikan, sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan produksi penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan. BBPI berpeluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut melalui penyiapan, pelayanan dan publikasi : teknologi, bahan standar, sertifikasi sarana dan operasi penangkapan ikan, pengawakan kapal dan tenaga kerja perikanan tangkap.

Permintaan masyarakat perikanan tangkap untuk memperoleh bahan bimbingan teknik penangkapan dari tahun ke tahun dirasakan terus meningkat, sehingga terbuka peluang bagi BBPI untuk meningkatkan penyiapan bahan bimbingan sesuai dengan tingkat pendidikan yang memerlukannya. Peluang-peluang tersebut meliputi :

- Peluang penguatan dan akselerasi fokus pada peningkatan daya serta hasil guna teknologi penangkapan ikan tuna dan penanganannya di kapal paska penangkapan ikan,
- Peluang penguatan dan akselerasi peningkatan daya serta hasil guna teknologi penangkapan ikan yang sesuai dengan karakteristik perairan wilayah program minapolitan
- Peluang perekayasaan teknologi penangkapan ikan yang mengarah kepada efisiensi SDI dan operasional penangkapan ikan
- Peluang perekayasaan teknologi penangkapan ikan untuk sistem identifikasi dan pemantauan usaha penangkapan ikan

2) Kebijakan Pemerintah Pusat

Adanya kebijakan pemerintah pusat di berbagai aspek untuk peningkatan kesejahteraan nelayan sangat mendukung tugas dan fungsi Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang. BBPI memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi penangkapan ikan yang diperlukan dalam pencapaian program minapolitan dan industrialisasi.

3) Kepercayaan Pihak Luar/Kerjasama Kemitraan

Sudah terjalinnya kerja sama serta kepercayaan dari pihak dalam dan luar negeri dalam bidang survey, kajian, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lainnya merupakan peluang pengembangan peran BBPI. Sinergi kerjasama dan tindak lanjut kegiatan dengan *stakeholders* terkait dengan kegiatan-kegiatan pengkoordinasian, perencanaan dan penyusunan program kerja BBPI, serta dalam upaya peningkatan kualitas serta pemenuhan jumlah SDM yang kompeten.

4) Potensi sumber daya ikan

Potensi sumber daya ikan masih dirasakan sangat besar terutama di perairan laut dalam. Kondisi sumberdaya ikan selain perairan dalam pun berpotensi untuk dimanfaatkan dengan penerapan teknologi penangkapan yang memperhatikan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

5) Sumberdaya Manusia Perikanan Tangkap

Kontribusi SDM nelayan terhadap tenaga kerja nasional cukup besar namun penyebarannya tidak merata. Secara individual, untuk daerah tertentu kualitasnya masih rendah dan transformasi teknologi modern belum optimal, sehingga diperlukan pembinaannya dilakukan dengan pendekatan kelompok (kelembagaan) melalui fungsi BBPI. Di sisi lain SDM penyuluh perikanan tangkap jumlah dan perannya semakin menurun sehingga peranan BBPI sebagai pusat teknologi penangkapan ikan yang inovatif dan bertanggung jawab menjadi lebih dibutuhkan.

6) Dukungan dari Berbagai Instansi

Letak geografis BBPI sangat strategis berada di ibukota propinsi Jawa Tengah yang posisinya merupakan sentra/barometer perikanan tangkap di Indonesia, mendapatkan dukungan dari berbagai instansi yang dapat mendukung Pelaksanaan Tugas BBPI Semarang, antara lain :

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota terutama yang memiliki wilayah pantai
- Balai Penelitian dan Standarisasi Industri dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan;
- Galangan Kapal;
- Pelabuhan Perikanan dan Umum;
- Perusahaan perikanan tangkap skala kecil, sedang maupun besar;
- Fakultas Perikanan dan Kelautan serta Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan;
- Pusat pendaratan ikan; dan

- Pasar ikan.

7) Wilayah Kerja seluruh Indonesia

Wilayah kerja yang mencakup seluruh nusantara, merupakan potensi pengembangan teknologi, sistem informasi, standarisasi dan sertifikasi dalam kegiatan penangkapan ikan di daerah-daerah yang terpencil. Wilayah kerja yang meliputi seluruh propinsi di Indonesia juga menjadikan eksistensi BBPI sebagai pusat teknologi penangkapan ikan yang inovatif dan bertanggung jawab, menjadi lebih dibutuhkan dan dituntut kinerjanya secara lebih kompeten. Hal tersebut merupakan peluang apabila ditunjang oleh tersusunnya jaringan kerja dan evaluasi bimbingan teknis serta diseminasi teknologi yang tertata dengan baik, misalnya melalui pembentukan Balai atau Loka di beberapa wilayah pengelolaan perikanan yang strategis.

8) Otonomi Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, perkembangan di daerah semakin terbuka. Kewenangan dinas-dinas di propinsi dan kabupaten/kota semakin besar. Hal ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh Balai Pengembangan Penangkapan Ikan untuk meningkatkan kemitraan.

II. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

1) Pemanfaatan Sumberdaya Ikan

Pemanfaatan Sumberdaya Ikan saat ini belum tertata dengan baik, di samping itu masih banyak penangkapan ikan secara ilegal (*IUU Fishing*), baik oleh pihak luar negeri maupun domestik yang menyebabkan terjadinya *overfishing* di WPP. Hal ini memerlukan peningkatan pengelolaan SDI sesuai dengan Tata Laksana Pengelolaan Perikanan yang Bertanggungjawab (*CCRF*) dengan disertai teknik pengawasan perikanan tangkap yang lebih handal.

Di sisi lain, perencanaan kegiatan BBPI dirasakan kurang maksimal akibat faktor penyesuaian dengan musim/iklim di lokasi kegiatan dan kuantitas SDM yang tersedia, kurang mendukung optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan. Wilayah kerja yang cukup luas meliputi seluruh WPP di Indonesia, serta kegiatan nelayan terkonsentrasi pada wilayah pantai, juga dirasakan mengakibatkan semakin tingginya tekanan SDI di wilayah pantai.

2) Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi

Banyak kegagalan dalam mengidentifikasi standar sistem baku mutu, produktifitas, dan peningkatan produk serta sarana penangkapan ikan, seperti : jumlah, ukuran atau berat ikan tangkapan; jenis, jumlah, desain, ukuran alat penangkapan dan bantu penangkapan ikan; daerah, jalur, waktu dan musim penangkapan; SPO penangkapan; pencegahan pencemaran; pengawakan kapal, tenaga kerja perikanan tangkap; dan kerusakan kelestarian SDI beserta lingkungannya. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya produksi untuk ekspor

hasil perikanan tangkap ke luar negeri, akibat penerapan standardisasi secara ketat.

3) Rekrutmen Pegawai

Adanya kesenjangan di dalam pengadaan tenaga teknis sehingga terjadi jarak yang cukup signifikan antara tenaga fungsional yang ada dengan calon tenaga fungsional yang baru. Banyaknya pegawai mencapai BUP dalam kurun waktu 4 tahun ke depan yang mencapai +/- 30 orang memerlukan adanya rekrutmen pegawai yang berkesinambungan untuk kaderisasi, serta ditunjang dengan peningkatan pendidikan/keterampilan yang intensif melalui pendidikan formal dan non formal baik didalam maupun luar negeri.

4) Arus Globalisasi

Arus globalisasi dalam bentuk kebijakan perdagangan bebas telah disepakati dan sudah digulirkan oleh ASEAN (AFTA), hal tersebut merupakan tantangan bagi dunia perikanan tangkap di Indonesia untuk bersaing dalam menghasilkan produk perikanan berkualitas sesuai standar internasional. Era globalisasi dan pasar bebas yang mulai diterapkan tahun 2010 menuntut Indonesia sebagai negara produsen produk perikanan untuk menyiapkan standar mutu yang sesuai, sehingga dapat mengeksport dan re-ekspor produknya ke negara anggota Uni Eropa.

5) Kebijakan Kabupaten/Kota tidak sinkron dengan kebijakan pusat/KKP

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka semua kegiatan pemerintahan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kepentingan daerah. Hal ini merupakan tantangan bagi BBPI agar mampu menjalin sinergi dan jejaring terhadap kabupaten/kota di daerah agar tugas dan fungsi tetap terlaksana secara optimal.

6) Kepatuhan Pelaku Usaha

Kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap berbagai standar baku sarana penangkapan ikan, seperti : jumlah, ukuran atau berat ikan tangkapan; jenis, jumlah, desain, ukuran alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan; daerah, jalur, waktu dan musim penangkapan; prosedur operasional standar penangkapan; pencegahan pencemaran; pengawakan kapal, tenaga kerja perikanan tangkap; dan resiko kerusakan kelestarian SDI beserta lingkungannya, dirasakan masih rendah. Hal ini merupakan tantangan bagi BBPI untuk melakukan pendekatan dan membangun jejaring secara lebih baik kepada pelaku usaha agar tercapai optimalisasi penangkapan ikan melalui pendekatan teknologi secara efektif, efisien serta bertanggung jawab.

6.2 Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

Faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi dalam Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dan Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) selanjutnya dianalisis dengan memberikan bobot, rating dan skor sehingga menghasilkan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE).

Pembobotan pada masing-masing faktor yang telah diidentifikasi dalam PLI dan PLE diberi nilai sesuai dengan dampak strategis yang ditimbulkan. Nilai pembobotan yang tinggi diberikan kepada faktor strategis yang memberikan dampak besar bagi kinerja pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah, dan sebaliknya. Pemberian bobot pada faktor-faktor internal secara keseluruhan yang meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) adalah 100. Demikian pula dengan pemberian bobot pada faktor-faktor eksternal secara keseluruhan yang meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) adalah 100.

Rating merupakan respon manajemen organisasi terhadap faktor-faktor strategis internal dan eksternal. Nilai rating untuk faktor-faktor tersebut ditetapkan dengan kisaran nilai antara 1 sampai dengan 4. Klasifikasi kisaran penilaian rating adalah:

Nilai 1 : paling tidak menonjol

Nilai 2 : tidak menonjol

Nilai 3 : menonjol

Nilai 4 : sangat menonjol

Skor pada penilaian KAFI dan KAFE adalah hasil perkalian antara bobot dan rating pada setiap faktor strategis pada hasil identifikasi Pencermatan Lingkungan Internal dan Pencermatan Lingkungan Eksternal. Skor yang diperoleh menunjukkan skala prioritas dampak masing-masing Pencermatan Lingkungan Internal dan Pencermatan Lingkungan Eksternal terhadap kinerja Balai Besar Penangkapan Ikan. Hasil penetapan skala prioritas pada setiap faktor strategis tersebut merupakan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE). Hasil analisis KAFI dan KAFE dalam Rencana Strategis Balai Besar Penangkapan Ikan 2020 – 2024 ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel VI.1

Format KAFI dalam Rencana Strategis Balai Besar Penangkapan Ikan Tahun 2020 - 2024

NO.	FAKTOR INTERNAL STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR	PRIORITAS
A	<i>Kekuatan (Strength):</i>				
	1. Eksistensi peran Balai Besar Penangkapan Ikan	10	4	30	II
	2. Potensi Sumber Daya Manusia yang Berpengalaman di Bidang Penangkapan Ikan	10	4	40	I
	3. Teknologi dan Informasi Penangkapan Ikan melalui Kompetensi Kerekayasaan	10	4	40	I

NO.	FAKTOR INTERNAL STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR	PRIORITAS
	4. Dukungan Sarana-Prasarana	10	4	40	I
	5. Kuantitas Sumber Daya Manusia	10	3	30	II
B	Kelemahan (<i>Weakness</i>):				
	1. Kinerja Organisasi BBPI	10	4	40	I
	2. Pembakuan Prosedur Operasional Standar (POS)	10	3	30	II
	3. Pemberdayaan dan Kualitas SDM di bidang Penangkapan Ikan	10	4	40	I
	4. Pemberdayaan Sarana dan Prasarana	10	3	30	II
	5. Kontinuitas dan Sinergitas Kegiatan Kerekayasaan	10	3	30	II
	JUMLAH	100			

Tabel VI.2

Format KAFE dalam Rencana Strategis Balai Besar Penangkapan Ikan Tahun 2020 – 2024

NO.	FAKTOR EKSTERNAL STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR	PRIORITAS
A	Peluang (<i>Opportunities</i>):				
	1. Kebutuhan Masyarakat yang Tinggi terhadap Teknologi dan Informasi di bidang Penangkapan Ikan	10	4	40	I
	2. Kebijakan Pemerintah Pusat	5	4	20	III
	3. Kepercayaan Pihak Luar/ Kerjasama Kemitraan	5	3	15	III
	4. Potensi sumber daya ikan	10	4	40	I
	5. Sumberdaya Manusia Perikanan Tangkap	5	3	15	III
	6. Dukungan dari berbagai Instansi	10	4	40	I
	7. Wilayah Kerja seluruh Indonesia	5	3	15	IV
	8. Otonomi Daerah	5	3	15	IV
B	Ancaman (<i>Threats</i>):				
	1. Pemanfaatan Sumberdaya Ikan	10	4	40	I
	2. Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi	10	3	30	II
	3. Rekrutmen Pegawai	10	4	40	I
	4. Arus Globalisasi	5	3	15	IV
	5. Kebijakan Kabupaten/Kota tidak sinkron dengan kebijakan pusat/KKP	5	3	15	IV
	6. Kepatuhan Pelaku Usaha	5	3	15	IV
	JUMLAH	100			

6.3 Penetapan Asumsi Strategis KAFI dan KAFE melalui Analisis SWOT

Berdasarkan hasil penetapan prioritas pada penyusunan KAFI dan KAFE yang menentukan kinerja BBPI, dilakukan analisis yang mendalam untuk menentukan asumsi – asumsi strategis dengan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT pada Rencana Strategis Balai Besar Penangkapan Ikan tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel VI.3

Analisis SWOT dalam Rangka Menentukan Asumsi Strategis pada Rencana Strategis Balai Besar Penangkapan Ikan tahun 2020 – 2024

KAFI KAFE	Strength (S)	Weakness (W)
<p style="text-align: center;">Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan Masyarakat yang Tinggi terhadap Teknologi dan Informasi di bidang Penangkapan Ikan⁽¹⁾ • Kebijakan Pemerintah Pusat⁽³⁾ • Kepercayaan Pihak Luar / Kerjasama Kemitraan⁽¹⁾ • Potensi sumber daya ikan⁽³⁾ • Sumberdaya Manusia Perikanan Tangkap⁽³⁾ • Dukungan dari Berbagai Instansi⁽¹⁾ • Wilayah Kerja seluruh Indonesia⁽⁴⁾ • Otonomi Daerah⁽⁴⁾ 	<p style="text-align: center;">Asumsi Strategi (SO):</p> <p>Optimalisasi eksistensi dan kinerja BBPI dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap Teknologi dan Informasi di bidang Penangkapan Ikan, serta pemanfaatan potensi sumber daya ikan di seluruh wilayah Indonesia, melalui program-program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. optimalisasi kegiatan diseminasi teknologi dan informasi penangkapan ikan, melalui kompetensi kereyakasaan BBPI 2. optimalisasi pemanfaatan sarana-prasarana BBPI 3. pemanfaatan kuantitas SDM BBPI yang berpengalaman 4. peningkatan jejaring / kerjasama kemitraan dari berbagai instansi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah serta memanfaatkan peluang otonomi daerah 	<p style="text-align: center;">Asumsi Strategi (WO):</p> <p>Peningkatan kinerja BBPI dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap teknologi dan informasi, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam dan manusia perikanan tangkap, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja organisasi BBPI 2. Peningkatan upaya-upaya persiapan dan pelaksanaan pembakuan Prosedur Operasional Standar (POS) penangkapan ikan 3. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM di bidang Penangkapan Ikan 4. Peningkatan pemberdayaan sarana dan prasarana 5. Peningkatan kontinuitas dan sinergitas kegiatan kereyakasaan 6. Peningkatan jejaring / kerjasama kemitraan dari berbagai instansi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah serta memanfaatkan peluang otonomi daerah

<p style="text-align: center;">Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Sumberdaya Ikan⁽¹⁾ • Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi⁽²⁾ • Rekrutmen Pegawai⁽¹⁾ • Arus Globalisasi⁽⁴⁾ • Kebijakan Kabupaten/Kota tidak sinkron dengan kebijakan pusat/KKP⁽⁴⁾ • Kepatuhan Pelaku Usaha⁽⁴⁾ 	<p>Asumsi Strategi (ST): Optimalisasi eksistensi beserta potensi SDM BBPI dalam pemanfaatan sumberdaya ikan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi penangkapan ikan terutama dalam hal kerekayasaan 2. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung di BBPI 3. Peningkatan Kualitas SDM BBPI 4. Peningkatan persiapan dan penerapan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka antisipasi arus globalisasi 5. Perbaikan manajemen rekrutmen pegawai BBPI oleh pemerintah pusat 6. Peningkatan upaya-upaya sinkronisasi kebijakan antara BBPI, pemerintah pusat/KKP dan pemerintah daerah (Kab/Kota) 7. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha 	<p>Asumsi Strategi (WT):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan kondisi internal BBPI, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kinerja organisasi BBPI b. Peningkatan upaya-upaya persiapan dan pelaksanaan pembakuan Prosedur Operasional Standar (POS) penangkapan ikan c. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM di bidang Penangkapan Ikan d. Peningkatan pemberdayaan sarana dan prasarana e. Peningkatan kontinuitas dan sinergitas kegiatan kerekayasaan 2. Perbaikan kondisi eksternal BBPI, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya ikan tangkapan dan kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan b. Peningkatan persiapan dan penerapan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka antisipasi arus globalisasi c. Perbaikan manajemen rekrutmen pegawai BBPI oleh pemerintah pusat d. Peningkatan upaya-upaya sinkronisasi kebijakan antara BBPI, pemerintah pusat/KKP dan pemerintah daerah (Kab/Kota)
---	---	--

6.4 Penetapan Proritas Asumsi Strategis Berdasarkan Tingkat Keterkaitan dengan Visi dan Misi

Penetapan urutan pilihan asumsi strategis diperoleh dengan cara penilaian keterkaitan atau kedekatan asumsi-asumsi strategis dengan visi dan misi yang ditetapkan pada Balai Besar Penangkapan Ikan. Skor penilaian keterkaitan atau tingkat kedekatan antara asumsi – asumsi strategis dengan visi dan misi dalam empat tingkat keterkaitan adalah :

- Nilai 4 : paling terkait
- Nilai 3 : terkait
- Nilai 2 : kurang terkait
- Nilai 1 : sangat kurang terkait

Penetapan urutan pilihan asumsi strategis Rencana Strategis Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) tahun 2020 – 2024 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel VI. 4

Penetapan Urutan Pilihan Asumsi Strategis Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) tahun 2020 – 2024

Asumsi Strategis	Skor Keterkaitan antar Asumsi Strategis dengan:					Urutan Asumsi Strategis	
	Visi	Misi					
		M1	M2	M3	M4		M5
Asumsi Strategi (SO):							
1. Optimalisasi kegiatan diseminasi teknologi dan informasi penangkapan ikan, terutama dalam hal kerekayasaan BBPI	4	3	4	4	3	4	22 (I)
2. Optimalisasi pemanfaatan sarana-prasarana BBPI	3	4	3	3	3	4	20 (III)
3. Pemanfaatan kuantitas SDM BBPI yang berpengalaman	3	4	3	3	3	4	20 (IV)
4. Peningkatan jejaring/kerjasama kemitraan dari berbagai instansi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah serta memanfaatkan peluang otonomi daerah	2	3	2	4	2	4	17 (XVII)
Asumsi Strategi (ST):							
1. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi penangkapan ikan terutama dalam hal kerekayasaan	4	4	4	3	3	4	22 (II)
2. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung di BBPI	3	4	3	3	3	4	20 (V)
3. Peningkatan kualitas SDM BBPI	3	4	3	3	3	4	20 (VI)
4. Peningkatan persiapan dan penerapan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka antisipasi arus globalisasi	3	2	3	3	4	4	19 (XIV)
5. Perbaikan manajemen rekrutmen pegawai BBPI oleh pemerintah pusat	2	4	2	2	2	3	15 (XXIV)
6. Peningkatan upaya-upaya sinkronisasi kebijakan antara BBPI, pemerintah pusat/KKP dan pemerintah daerah (Kab/Kota)	2	3	2	3	2	4	16 (XXII)
7. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha	2	2	2	2	3	3	14 (XXVI)
Asumsi Strategi (WO):							
1. Peningkatan kinerja organisasi BBPI	3	4	2	2	2	4	17 (XVIII)
2. Peningkatan upaya-upaya persiapan dan pelaksanaan pembakuan Prosedur Operasional Standar (POS) penangkapan ikan	3	2	3	3	4	4	19 (XV)
3. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM di bidang Penangkapan Ikan	3	4	3	3	3	4	20 (VII)
4. Peningkatan pemberdayaan sarana dan prasarana	3	4	3	3	3	4	20 (VIII)

Asumsi Strategis	Skor Keterkaitan antar Asumsi Strategis dengan:						Urutan Asumsi Strategis
	Visi	Misi					
		M1	M2	M3	M4	M5	
5. Peningkatan kontinuitas dan sinergitas kegiatan kerekayasaan	4	2	4	3	3	4	20 (IX)
6. Peningkatan jejaring/kerjasama kemitraan dari berbagai instansi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah serta memanfaatkan peluang otonomi daerah	2	3	2	4	2	4	17 (XIX)
Asumsi Strategi (WT):							
1. Peningkatan kinerja organisasi BBPI	3	4	2	2	2	4	17 (XX)
2. Peningkatan upaya-upaya persiapan dan pelaksanaan pembakuan Prosedur Operasional Standar (POS) penangkapan ikan	3	2	3	3	4	4	19 (XVI)
3. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM di bidang Penangkapan Ikan	3	4	3	3	3	4	20 (X)
4. Peningkatan pemberdayaan sarana dan prasarana	3	4	3	3	3	4	20 (XI)
5. Peningkatan kontinuitas dan sinergitas kegiatan kerekayasaan	4	2	4	3	3	4	20 (XII)
6. Peningkatan upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya ikan tangkapan dan kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan	3	2	3	2	3	4	17 (XXI)
7. Peningkatan persiapan dan penerapan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka antisipasi arus globalisasi	3	2	3	4	4	4	20 (XIII)
8. Perbaiki manajemen rekrutmen pegawai BBPI oleh pemerintah pusat	2	4	2	2	2	3	15 (XXV)
9. Peningkatan upaya-upaya sinkronisasi kebijakan antara BBPI, pemerintah pusat/KKP dan pemerintah daerah (Kab/Kota)	2	3	2	3	2	4	16 (XXIII)

6.5 Penetapan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPI ke depan akan semakin bertambah berat, mengingat cakupan wilayah kerja yang sangat luas meliputi seluruh Indonesia serta makin tingginya kebutuhan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap. Berdasarkan hasil analisis keterkaitan antara berbagai asumsi strategis dengan visi dan misi; skala prioritas faktor kunci keberhasilan dalam rangka pengelolaan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat adalah :

1. Optimalisasi kegiatan diseminasi teknologi dan informasi penangkapan ikan, terutama dalam hal kerekayasaan BBPI
2. Optimalisasi pemanfaatan sarana – prasarana BBPI
3. Pemberdayaan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas SDM di bidang Penangkapan Ikan, baik kalangan internal BBPI maupun masyarakat perikanan tangkap
4. Peningkatan kontinuitas dan sinergitas kegiatan kerekayasaan
5. Peningkatan persiapan dan penerapan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka antisipasi arus globalisasi
6. Peningkatan upaya-upaya persiapan dan pelaksanaan pembakuan Prosedur Operasional Standar (POS) penangkapan ikan
7. Peningkatan jejaring/kerjasama kemitraan dari berbagai instansi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah serta memanfaatkan peluang otonomi daerah
8. Peningkatan kinerja organisasi BBPI
9. Peningkatan upaya – upaya pemanfaatan sumberdaya ikan tangkapan dan kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan
10. Peningkatan upaya-upaya sinkronisasi kebijakan antara BBPI, pemerintah pusat/KKP dan pemerintah daerah (Kab/Kota)
11. Perbaikan manajemen rekrutmen pegawai BBPI oleh pemerintah pusat



Bab 7

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan dan Sasaran.....	54
Strategi	56
Kebijakan.....	56

7.1 Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan analisis pemecahan masalah, diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan, dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

MISI 1 :

Meningkatkan pengelolaan organisasi, fasilitas, keuangan dan SDM yang terintegrasi. (M1)

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Organisasi, fasilitas, SDM, dan keuangan BBPI;

Sasaran:

- a. Meningkatnya pelayanan organisasi BBPI
- b. Meningkatnya pemanfaatan fasilitas, pemberdayaan dan kualitas SDM BBPI
- c. Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan BBPI

MISI 2 :

Mewujudkan teknologi pemanfaatan SDI yang handal (M2)

Tujuan :

Menghasilkan teknologi penangkapan ikan untuk pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab

Sasaran :

- a. Diperolehnya teknologi sarana penangkapan ikan yang inovatif dan bertanggung jawab
- b. Terlaksananya pemanfaatan sumberdaya ikan yang berkelanjutan

MISI 3 :

Meningkatkan pelayanan jasa, sistem informasi dan kerjasama di bidang teknologi perikanan tangkap (M3)

Tujuan :

Peningkatan pelayanan jasa sarana uji terap penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan, kerjasama teknis penangkapan ikan, dan sistem informasi penangkapan ikan.

Sasaran:

- a. Terlaksananya pelayanan jasa sarana uji terap penangkapan ikan dan habitat sumber daya ikan,
- b. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan system informasi dibidang teknologi perikanan tangkap
- c. Terlaksananya kerjasama teknis dan bimbingan teknis di bidang teknologi penangkapan ikan
- d. Termanfaatkannya kerjasama dan pelayanan jasa dibidang teknologi penangkapan ikan

MISI 4 :

Mewujudkan pengujian, penyiapan bahan standar di bidang sarana penangkapan dan habitat sumber daya ikan, serta sertifikasi pengelolaan penangkapan ikan yang mandiri dan handal (M4)

Tujuan :

Terwujudnya pengujian kelayakan teknis, penyiapan bahan standar dan sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal dan tenaga kerja perikanan tangkap

sasaran:

- a. Terlaksananya pengujian kelayakan teknis di bidang sarana penangkapan ikan serta
- b. tersedianya bahan standar sarana penangkapan ikan, dan habitat sumberdaya ikan
- c. Terlaksananya sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal dan tenaga kerja perikanan tangkap;

7.2 Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Berdasar pada tujuan dan sasaran di atas, Balai Besar Penangkapan Ikan memiliki strategi sebagai berikut:

1. Pelayanan organisasi dan tata laksana perkantoran berdasarkan prosedur operasional standar (POS);
2. Memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kepada SDM BBPI
3. Memenuhi ketersediaan, perawatan dan pemeliharaan fasilitas BBPI
4. Menyeleksi teknologi perikanan tangkap yang diuji terap
5. Menyiapkan teknologi inovatif dan bertanggung jawab untuk didiseminasikan
6. Menyiapkan bahan standar dan sertifikasi serta uji kesesuaian sarana dan operasi penangkapan ikan, pengawakan kapal dan tenaga kerja perikanan tangkap
7. Menyiapkan kerjasama dan pelayanan jasa dibidang teknologi perikanan tangkap

7.3 Kebijakan

Pelaksanaan tujuan, sasaran dan strategi perlu didukung komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi yang harmonis di antara penyelenggara dengan instansi atau *stakeholders* Balai, sehingga dalam pengambilan keputusan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan Balai sampai dengan evaluasi dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hal tersebut

diimplementasikan pada kajian FKK (Faktor-faktor Kunci Keberhasilan) dan strategi yang telah dipilih.

Menindak-lanjuti strategi yang telah dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif, akan disusun kebijakan-kebijakan yang selaras dan gayut terhadap implementasi atau pelaksanaan renstra 5 (lima) tahun ke depan. Kebijakan tersebut merupakan tindak-lanjut dan pengembangan dari strategi yang telah disesuaikan dengan kondisi aktual BBPI, sehingga dapat disusun program-program kegiatan yang akurat, terutama dalam prospek pelaksanaan program di tingkat bagian, sub-bagian dan bidang. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja dilaksanakan dalam sistem organisasi dan ketatalaksanaan yang ada, sehingga kajian kebijakan dan program lebih bersifat SISTEMIK yang mengikat ke seluruh unit kerja BBPI. Hal ini yang mendasari penyusunan kebijakan dan program-program kerja yang didasarkan pada kemudahan pelaksanaan di tingkat bagian, sub-bagian dan bidang, BUKAN pada sifat prioritas kegiatan yang harus dilakukan.

Proses pengembangan mutu kelembagaan perlu ditingkatkan secara terus menerus, sesuai dengan perkembangan dan permintaan pengguna jasa serta perkembangan teknologi terkini. Dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut di atas, Balai Besar Penangkapan Ikan pada penyusunan program-program kerja 5 (lima) tahun ke depan memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi dan prosentase penggunaan prasarana asrama, kelas, armada penangkapan dan alat tangkap yang dimiliki BBPI Semarang;
2. Meningkatkan kualitas Organisasi, Tata Laksana Perkantoran, administrasi keuangan dan SDM BBPI serta masyarakat nelayan yang berbasis pengetahuan terhadap teknologi perikanan tangkap dan pengelolaan sumberdaya yang lestari;
3. Meningkatkan serta mempublikasikan: standarisasi (RSNI), sertifikasi, akreditasi dan prosentase inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan serta kapal penangkap ikan yang dihasilkan kepada *stakeholders* perikanan tangkap;
4. Meningkatkan kualitas sistem informasi, penyiapan data sumberdaya ikan dan pemanfaatan akses *database* teknologi inovatif oleh masyarakat nelayan dan *stakeholders* lainnya;
5. Meningkatkan jumlah kegiatan uji terap, inovasi dan hasil rekayasa terhadap alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal penangkap ikan dan kelestarian sumber daya ikan yang sesuai kebutuhan; dan
6. Meningkatkan dukungan teknis, jumlah kerjasama, kemitraan dan pengembangan jaringan kerja yang diimplementasikan dalam sinkronisasi antar kebijakan dan persentase pemenuhan sarana sesuai kebutuhan.



Indikator Kinerja

Rencana kerja Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) merupakan bagian dalam rencana Strategis tahun 2020-2024, dengan mencakup Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran pada kurun waktu lima tahun. Sasaran dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang **relevan**, **sistemik** dan **bukan berkorelasi dengan urutan prioritas**, terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan tersebut akan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan program-program yang telah ditentukan, baru akan ditetapkan **program prioritas** dan **kegiatan pokok** pada tiap-tiap bagian, sub-bagian, bidang dan seksi tersebut sebagai suatu rangkaian sistemik agar tercapai indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome) dan indikasi Kegiatan kerangka anggaran yang jelas untuk mengukur kinerja yang akan dilakukan.

Indikator Kinerja Program Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut :

Tabel. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kesejahteraan nelayan meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	102	103	105	106	107
		2	Rata-rata pendapatan Nelayan (Rp/nelayan/bulan)	3.952.000	4.229.000	4.548.000	4.911.000	5.360.000
2.	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	3	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	<	<	<	<	<
3.	Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan	4	Nilai PNBP Ditjen Perikanan Tangkap (Rp. Miliar)	928,679	551,370	656,535	657,951	659,201
4	Tata kelola sumber daya perikanan bertanggung jawab	5	Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan dan WPPNRI (persen)	100	100	100	100	100
5	Produksi Perikanan Tangkap Meningkat	6	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	8,020	8,421	8,881	9,434	10,105
		7	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp triliun)	231,311	247,677	266,459	289,167	316,805
		8	Persentase dukungan sarana dan prasarana	100	100	100	100	100

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			produksi perikanan tangkap (persen)					
6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik	9	Nilai kinerja reformasi birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	A(85)	A(85)	A(85)	A(85)	A(85)
		10	Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker)	9	12	16	19	23
		11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	60	61	62	63	64
		12	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	82	84	86	88	90
		13	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		14	Batas tertinggi persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2019 (persen)	1	1	1	1	1

Indikator kinerja Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang mengalami perubahan pada Triwulan II menjadi :

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Perekayasaan, pemanfaatan, dan standarisasi teknologi penangkapan ikan yang berdaya saing	1	Jumlah Rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan	7	19	23	27	31
2	Tata kelola sumber daya	2	Pemenuhan informasi	1	1	2	2	2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
perikanan bertanggung jawab	rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (WPPNRI 712) (dokumen)					

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Balai Besar Penangkapan Ikan merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja Eselon I

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan	1. Jumlah Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Teknologi Penangkapan Ikan	2	6	7	8	9
	2. Jumlah Rancangan Teknis Standar	3	11	13	14	16

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Nasional Indonesia dan Sertifikasi Penangkapan Ikan					
	3 Jumlah Pelayanan Jasa dan Kerjasama Penangkapan Ikan	2	2	3	5	6

Program-program pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2020-2024 meliputi:

1. Mewujudkan teknologi pemanfaatan SDI yang handal, meliputi:
 - a. Menyiapkan Teknologi terekomendasi uji terap teknik sarana penangkapan ikan
 - b. Menyiapkan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya ikan
2. Meningkatkan pelayanan jasa, sistem informasi dan kerjasama di bidang teknologi perikanan tangkap, meliputi:
 - a. Pelaksanaan layanan jasa dan sistem informasi penangkapan ikan
 - b. Pelaksanaan kerja sama dan bimbingan teknis penangkapan ikan
3. Mewujudkan pengujian, penyiapan bahan standar di bidang sarana penangkapan dan habitat sumber daya ikan, serta sertifikasi pengelolaan penangkapan ikan yang mandiri dan handal, meliputi:
 - a. Penyiapan RSNI Sarana Penangkapan Ikan;
 - b. Pelaksanaan Sertifikasi Sarana Penangkapan Ikan, Pengawakan Kapal Dan Tenaga Kerja Perikanan Tangkap
4. Meningkatkan pengelolaan organisasi, fasilitas, keuangan dan SDM yang terintegrasi, meliputi :
 - a. Peningkatan Pelayanan Organisasi
 - b. Peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM BBPI
 - c. Peningkatan pemanfaatan fasilitas, pemberdayaan dan kualitas SDM BBPI
 - d. Sistem keuangan yang transparan dan akuntabel

Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu melalui kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel VIII.1

Matriks Perencanaan Strategis Balai Besar Penangkapan Ikan Tahun 2015 - 2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.	Mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik	Peningkatan Mutu pengelolaan Organisasi, fasilitas, keuangan serta SDM	a. Peningkatan Pelayanan Organisasi b. Peningkatan Kompetensi dan pengembangan SDM BBPI c. Sistem keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Perencanaan dan program 2. Apresiasi kompetensi tenaga ahli sesuai bidangnya. 3. Sertifikasi personil 4. Apresiasi analisis beban kerja, analisis jabatan, Prosedur Operasional Standar (POS) 5. Magang/training/diklat pegawai di dalam/luar negeri 6. Monitoring dan evaluasi kegiatan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
	Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan	Produksi perikanan tangkap meningkat	Kerekayasaan uji Terap Teknologi Pemanfaatan SDI inovatif, Aplikatif dan bertanggung jawab	a. Uji terap teknologi Pemanfaatan SDI inovatif, Aplikatif dan bertanggung jawab b. Penyiapan bahan hasil kerekayasaan Pemanfaatan SDI inovatif, Aplikatif dan bertanggung jawab	Melakukan penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, analisis pelaksanaan dan penyebarluasan hasil uji terap habitat SDI
				Sinergitas Pelayanan jasa, sistem	a. Pelaksanaan pelayanan system informasi dan	1. Bimbingan Teknis di bidang pemanfaatan SDI

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
				informasi dan kerjasama di bidang teknologi penangkapan ikan	kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dibidang teknologi perikanan tangkap b. Pelaksanaan pelayanan jasa dibidang teknologi perikanan tangkap c. Peningkatan kerjasama dan pelayanan jasa dibidang teknologi perikanan tangkap	yang ramah lingkungan 2. Pelaksanaan Pelayanan Jasa sarana uji terap sarana penangkapan ikan dan habitat SDI 3. Pelaksanaan Bimbingan teknis Penangkapan 4. Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi penangkapan ikan. 5. Kerjasama Teknik penangkapan ikan
				Kesesuaian penyiapan bahan standar dan sertifikasi teknologi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal perikanan.	a. Penyiapan Bahan Standar sarana dan operasi penangkapan ikan, pengawakan kapal dan tenaga kerja perikanan tangkap b. Penyiapan Sertifikasi	1. Penyiapan bahan uji terap dan standarisasi kelayakan teknis kapal perikanan, alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan, habitat SDI dan operasi penangkapan. 2. Penyiapan bahan sertifikasi kapal perikanan alat penangkap dan alat bantu penangkapan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
					sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap	ikan, habitat SDI dan operasi penangkapan. 3. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 4. Pengujian Sarana penangkapan ikan 5. Sertifikasi Sarana Penangkapan Ikan



Bab 9

Penutup

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan pada Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) merupakan bagian dalam rencana Strategis tahun 2020 - 2024 , dengan mencakup Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran pada kurun waktu lima tahun (tahun 2020 - 2024). Sasaran dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam renstra perubahan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPPI), dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, implementasi penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 4 (empat) tahunan. RJM Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Tahun 2020 – 2024 ini juga dimaksudkan untuk

memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan kualitas pelayanan dasar dan tugas sehari-hari, baik program, proyek dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan serta tujuan, khususnya peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Daya Saing Ekonomi Rakyat serta mewujudkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi, seimbang dan berkualitas sesuai dengan RPJMN (2020 – 2024).

Pelaksanaan program-program dalam Renstra perubahan sangat terkait dengan semangat desentralisasi pelaksanaan kegiatan. Saat ini, penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan desentralisasi, karena pertimbangan kepentingan nasional dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Untuk itu secara umum keberhasilan dari renstra ini, diharapkan dapat mendorong perikanan tangkap sebagai kegiatan/usaha yang terkait dengan penangkapan ikan, baik sektor produksi, penunjang produksi maupun sektor pasca produksi.